

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DESA TOLADA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**KHUSNUL KHATIMAH H.**

17 0401 0192

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2024**

**PERAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM UPAYA  
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
DESA TOLADA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E.) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**Oleh**

**KHUSNUL KHATIMAH H.**

17 0401 0192

**Pembimbing:**

**Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khatimah H.  
NIM : 1704010192  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 23 Agustus 2024

Yang membuat pernyataan,



Khusnul Khatimah H.  
NIM 1704010192

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Program Keluarga Harapan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tolada yang ditulis oleh Khusnul Khatimah H. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0192, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 Miladiyah bertepatan dengan 8 Safar 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Palopo, 25 September 2024

### TIM PENGUJI

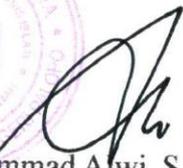
- |  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.          | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I             | Penguji I         | (  ) |
| 4. Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.        | Penguji II        | (  ) |
| 5. Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.          | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP 198201242009012006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah

  
  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.E.I.  
NIP 198907152019081001

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ  
لِلَّهِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَائِرِ آلِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا  
رَحْمَةُ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مُحَمَّدٍ وَعَلَى وَصَلِهِ أَجْمَعِينَ. أَهْلَ عَدَا  
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Program Keluarga Harapan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tolada” setelah melalui proses yang panjang.

Solawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan terkhusus kepada kedua orang tua saya tercinta Ayah Hamsah dan Ibunda Hirawati, yang sangat luar biasa dalam mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga, yang selalu

mendukung penulis dalam setiap situasi dan keadaan apapun sejak kecil hingga sekarang, sungguh penulis sadari tidak mampu membalas semua itu, hanya do'a yang dapat penulis persembahkan untuk mereka berdua semoga senantiasa berada

dalam limpah kasih sayang Allah swt., serta selalu mendoakan penulis dan memberikan banyak dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak di sampaikan dengan hormat kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Dr. Anita Marwing, S.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Dr. Fasiha, M.EI. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muzayannah Jabani, S.T., M.M., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Muhammad Alwi, S.E.Sy., M.EI., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah, Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E., selaku Sekertaris Prodi Ekonomi Syariah beserta para dosen, asisten dosen Prodi Ekonomi Syariah yang selama ini banyak memberikan ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ekonomi Syariah.
4. Dosen pembimbing, dalam hal ini Muhammad Alwi, S.E.Sy., M.EI., yang senantiasa memberikan bimbingan dan semangat kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Dr. Fasiha., S.E.I., M.E.I. selaku penguji I dan Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E.

selaku penguji II yang telah banyak memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo, Abu Bakar, S.Pd., M.Pd. beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literature untuk keperluan studi kepustakaan dalam menyusun skripsi ini dan seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu kelancaran pengurusan berkas-berkas skripsi ini sampai meraih gelar sarjana.
7. Dr. Ishak, S.EI., M.EI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
8. Seluruh dosen dan staf IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah IAIN Palopo yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini. Mudah-mudahan bantuan, motivasi, dorongan, kerja sama, dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak di sisi Allah SWT.
10. Kepada Saudara-saudara saya yang banyak memberikan dukungan selama ini.
11. Kepada sahabat-sahabat saya, Nur Amaliah Ismail, Annisa, Risnayanti, Salmiati, dan Israwati, serta Atika yang selama ini banyak membantu serta selalu memberikan semangat kepada penulis.
12. Penulis berterima kasih banyak kepada aparat desa Tolada dan masyarakat Desa Tolada yang telah menerima penulis untuk melakukan penelitian di desa Tolada. Serta pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat penulis tuliskan satu persatu.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun sangat diharapkan.

Akhir penulis berharap, semoga skripsi ini bermanfaat dan semoga Allah SWT menuntun ke arah yang benar dan lurus.

Palopo, 23 Agustus 2024

**Khusnul Khatimah H.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

**Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

**Tabel 0.2 Transliterasi Vocal Tunggal**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

**Tabel 0.3 Transliterasi Vocal Rangkap**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ-	<i>Fathahdanya'</i>	ai	a dani
اُوْ-	<i>Fathahdanwau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَاءِ : *hauila*

فَ

هَوَؤُ

لَ

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

**Tabel 0.4 Tabel Transliterasi Maddah**

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ   اِ   اِي	<i>Fathahdanalifatauya'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrahjanya'</i>	ī	Idangaris di atas
اِ : <i>ramā</i>	<i>Dammahdanwau</i>	ū	Udangaris di atas
اِ : <i>qila</i>			
اِ			
اِ			
اِ : <i>yamutu</i>			

4. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ طِفْلِ الْوَالِدِ : *raudhah al-athfal*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah al-fadhilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*(ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbana* -

نَجَّيْنَا : *najjaina* -

اَلْاَحْق : *al-haqq*

نُوعِيْم : *nu‘ima*

عَدُو : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

ع : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
 عِ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)  
 ع  
 عِ  
 عِ

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الش- شمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
 الزلزال : *al-zalzal* (*az-zalzal*)  
 الفلاسفة : *al-falsafah*  
 البلاد : *al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أمر : *ta'muruna*  
 النواع : *al-nau'*  
 شيء : *syai'un*  
 أميرة : *umirtu*  
 أميرة

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*FiZilal al-Qur'an*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

#### 9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *dinullah* ۱ *billah* \_

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *-hum fi rahmatillah*

#### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa maa Muhammadunillaa rasuul*

*Innaawwalabaitinwudi'alinnaasi lallazii bi Bakkatamubaarakan*

*SyahruRamadhaan al-laziiunzila fiih al-Qur'aan*

*Nashiir al-Diin al-Thuusii*

*Abuuu Nashr al-Faraabii*

*Al-Gazaali*

*Al-Munqiz min al-Dhalaal*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid MuhammadibnRusyd, ditulismenjadi: IbnuRusyd, Abual-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abual-Walid MuhammadIbnu)

Nasr Hamid AbuZaid, ditulismenjadi: AbuZaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *shubhanahu wa ta'ala*

SAW. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

a.s. = *'alaihi al-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM	=	Sebelum Masehi
Wr.	=	<i>Warahmatullaahi</i>
Wb.	=	<i>Wabarakaatuh</i>
l.	=	Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imraan/3: 4

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>Xv</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> ... ..	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
B. Kajian Pustaka .....	13
1. Program Keluarga Harapan... ..	13
2. Kemiskinan... ..	21
3. Upaya Pemberdayaan Fakir Miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam.....	24
4. Maqaashid Al-Syariah... ..	29
C. Kerangka Pikir .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Lokasi dan waktu penelitian .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Instrumen Penelitian.....	39
F. Teknik Analisis Data .....	40
G. Uji Keabsahan Data.....	42
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian... ..	45
1. Gambaran Umum Desa Tolada .....	45
2. Kondisi Kependudukan Desa Tolada .....	46
B. Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tolada .....	49
1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tolada. ....	49
2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Ekonomi .....	51
3. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Pendidikan... ..	52

4. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesehatan.....	57
C. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	60
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>70</b>

## **DAFTAR KUTIPAN AYAT**

Kutipan Ayat 2 QS Al-Ma'idah.....	24
Kutipan Ayat 25 QS Al-Hadid.....	28
Kutipan Ayat 19 QS Luqman.....	30
Kutipan Ayat 45 QS Al-'Ankabut.....	32
Kutipan Ayat 33 QS Al-Isra.....	33

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Utara.....	3
<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
<b>Tabel 4.2</b> Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tolada .....	47
<b>Tabel 4.3</b> Data Penduduk Menurut Pekerjaan di Desa Tolada .....	47
<b>Tabel 4.4</b> Jumlah Penerima PKH Desa Tolada.....	50
<b>Tabel 4.5</b> Sarana Pendidikan Desa Tolada .....	54
<b>Tabel 4.6</b> Jumlah Penerima PKH Komponen Pendidikan di Desa Tolada.....	56
<b>Tabel 4.7</b> Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 17-24 di Kabupaten Luwu Utara.....	56

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia September 2020- Maret 2023.....	3
<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pikir.....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1** Pedoman Wawancara

**Lampiran 2** Surat Izin Penelitian

**Lampiran 3** Halaman Persetujuan Pembimbing

**Lampiran 4** Nota Dinas Pembimbing

**Lampiran 5** Surat Keterangan MBTA

**Lampiran 6** Dokumentasi

**Lampiran 7** Daftar Riwayat Hidup

## **ABSTRAK**

**Khusnul Khatimah H., 2024.** *“Peran Program Keluarga Harapan dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tolada”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dibimbing oleh Muhammad Alwi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran program keluarga harapan (PKH) sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan menjadi salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Upaya pemberdayaan masyarakat melalui program keluarga harapan (PKH) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan melalui pendidikan dan kesehatan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang memberikan gambaran melalui data deskriptif berupa pernyataan lisan atau tertulis dari objek penelitian maupun pustaka. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi dengan unit pendamping serta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM/PKH) sebagai sumber data utama.

Berdasarkan hasil penelitian, program keluarga harapan (PKH) membantu mengurangi beban biaya pendidikan sehingga tidak ada lagi anak yang putus sekolah dikarenakan tidak mampu memenuhi perlengkapan sekolah. Selain itu, program tersebut berhasil meningkatkan kesadaran keluarga penerima manfaat (KPM) pentingnya imunisasi lengkap serta pemenuhan gizi anak usia dini. Meskipun program keluarga harapan belum mampu menyejahterakan penerimanya, namun dengan adanya program ini, memudahkan penerima manfaat PKH mengenyam pendidikan dan merubah pola pikirnya.

**Kata Kunci:** Kesejahteraan, PKH, Keluarga Penerima Manfaat.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang kompleks yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Keberadaan kemiskinan mencerminkan tantangan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan segera serta terkoordinasi dari berbagai sektor masyarakat dan pemerintah. Secara umum, kemiskinan tidak hanya berdampak pada penurunan kualitas hidup individu dan kelompok masyarakat, tetapi juga menghambat proses pembangunan dan pencapaian kesejahteraan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, konsensus global, termasuk dari pemerintah Indonesia, menegaskan bahwa kemiskinan adalah isu krusial yang harus ditangani melalui implementasi kebijakan dan program strategis yang efektif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna memastikan peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Soerjono Soekanto, kemiskinan didefinisikan sebagai situasi di mana individu tidak mampu mencapai standar hidup yang dianggap layak oleh kelompok sosialnya, serta gagal memaksimalkan potensi mental dan fisik yang dimilikinya dalam lingkungan kelompok tersebut. Garis kemiskinan menjadi salah satu penentu utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Selain itu, mengurangi tingkat pertumbuhan kemiskinan menjadi salah satu tujuan penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi suatu negara. Dalam konteks ini, upaya

---

<sup>1</sup>Rusdarti, Iva Faulana, Indri Murniawaty, "Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan PKH Di Jawa Tengah," *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi V* (2021): 1–13.

pengurangan angka kemiskinan tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hidup individu, tetapi juga berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Tingkat kemiskinan ini dapat diukur melalui rata-rata pengeluaran per kapita bulanan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan non-pangan agar seseorang tidak dikategorikan sebagai miskin. Pengukuran ini memberikan gambaran jelas tentang sejauh mana intervensi ekonomi dan sosial telah efektif dalam mengurangi kemiskinan di masyarakat.<sup>2</sup>

Garis kemiskinan berfungsi sebagai salah satu indikator yang mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, di mana pengurangan tingkat kemiskinan menjadi salah satu tujuan utama dalam pembangunan ekonomi sebuah negara. Tingkat kemiskinan diidentifikasi melalui jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita bulanan di bawah garis kemiskinan, yaitu batas minimum pengeluaran yang mencakup kebutuhan dasar pangan dan non-pangan yang harus dipenuhi agar seseorang tidak tergolong miskin. Oleh karena itu, pengendalian dan penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas dalam kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.<sup>3</sup> Penghasilan yang rendah tidak hanya berdampak kepada tidak terpenuhinya kebutuhan pokok atau dasar, namun

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 320.

<sup>3</sup>Chairika Nasution et al., "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan," *Perspektif* 12, no. 4 (2023): 1374–1388, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10076>.

membawa dampak juga kepada ketidakmampuan untuk melakukan pemenuhan standar kehidupan rerata yaitu standar pendidikan serta standar kesehatan. Selama periode September 2020 hingga Maret 2023, terjadi penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam hal jumlah maupun persentase penduduk miskin, dengan pengecualian pada September 2022. Pada bulan tersebut, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin disebabkan oleh lonjakan harga kebutuhan pokok sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sebelumnya, kenaikan serupa pada jumlah dan persentase penduduk miskin juga terjadi pada Maret 2020 dan September 2020, yang dipengaruhi oleh pembatasan mobilitas selama pandemi Covid-19. Grafik perkembangan tingkat kemiskinan dari September 2020 hingga Maret 2023 dapat dilihat pada Gambar 1.<sup>4</sup>

**Gambar 1.1** Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Indonesia September 2020 – Maret 2023



Sumber: Berita resmi statistik (BPS) 2023

Pada Maret 2023, persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu Utara tercatat sebesar 12,66%, yang menunjukkan penurunan sebesar 0,56% dibandingkan dengan Maret 2022, serta penurunan lebih signifikan sebesar 0,93%

<sup>4</sup>Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023,” 2023, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

jika dibandingkan dengan Maret 2021. Dalam jumlah absolut, pada Maret 2023, terdapat sekitar 40,79 ribu jiwa yang tergolong miskin di wilayah tersebut. Jumlah ini mengalami pengurangan sebanyak 1.500 jiwa dibandingkan dengan Maret 2022, dan penurunan lebih besar yaitu sebesar 2.360 jiwa jika dibandingkan dengan Maret 2021. Secara keseluruhan, dalam periode Maret 2019 hingga Maret 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara menunjukkan tren yang tidak stabil, dengan variasi baik dalam hal jumlah penduduk miskin maupun persentasenya, yang mencerminkan dinamika sosial ekonomi di daerah tersebut.<sup>5</sup>

**Tabel 1.1** Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Utara

Periode (Tahun)	Jumlah Penduduk Miskin (%)
2020	13,41%
2021	13,59%
2022	13,22%
2023	12,66%

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara

Tingkat kemiskinan tertinggi terjadi pada Maret 2021 dan terendah pada Maret 2023. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Utara meningkat di tahun 2021 disebabkan adanya bencana banjir bandang dan pandemi covid-19 pada tahun sebelumnya yang menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat tidak berjalan dengan baik, rusaknya sarana prasarana infrastruktur serta banyaknya lahan pertanian yang terkena dampak bencana banjir bandang di Luwu Utara.<sup>6</sup> Adapun

<sup>5</sup>Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara , Maret 2023,” no. 7 (2023): 3, <https://luwuutarakab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/29/18/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara--maret-2023.html>.

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik, “Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara 2021,” 2022, <https://luwuutarakab.bps.go.id/pressrelease/2022/01/03/6/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara-maret-2021.html>.

penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2023 salah satunya dipicu oleh pertumbuhan IPM (reduksi *shortfall*) dari tahun 2022-2023 sebesar 0,83 persen. Selain itu, tingkat pengangguran pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun sebelumnya.<sup>7</sup>

Pendidikan yang rendah, kurangnya keterampilan serta kurangnya motivasi dalam hidup untuk mengembangkan diri merupakan kondisi penyebab seseorang tidak mampu menyelesaikan kesulitan sosial mereka. Oleh karena itu, pembangunan pemberdayaan masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan mampu mengubah kondisi masyarakat miskin, menjadi lebih berdaya, mampu memperoleh pendidikan yang baik, serta mengubah hidupnya menjadi lebih baik.<sup>8</sup> Pentingnya pendidikan dalam membantu seseorang keluar dari lingkaran kemiskinan karena dengan pendidikan memberikan kesempatan untuk berkembang melalui ilmu pengetahuan atau keterampilan. Faktor penting lainnya penyebab kemiskinan, yaitu rendahnya tingkat kesehatan, seseorang yang cenderung sehat bisa mempunyai tingkatan produktivitas tinggi, penghasilan tinggi, pendidikannya tinggi, dan sesuatu yang positif lainnya.

Masalah kemiskinan membutuhkan penanganan serius guna mencegah peluang adanya penurunan generasi (*lost generation*) di masa yang akan datang. Pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan adalah dengan meningkatkan efektivitas upaya pengentasan kemiskinan, seperti pengenalan program-program berbasis perlindungan sosial (JAMKESMAS,

---

<sup>7</sup>Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara, Maret 2023."

<sup>8</sup>Isnaini Wiqoyatun Ni'mah, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Karangwader, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), 1.

RASKIN, BSM, PKH), program-program berbasis pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan pemberdayaan usaha mikro (KUR), yang menyoar masyarakat miskin dan kurang beruntung. Program-program ini didasarkan pada definisi perlindungan sosial, yang didefinisikan sebagai "semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial" dalam UU No. 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial".<sup>9</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Program Keluarga Harapan adalah program berupa bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin cluster terbawah yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dikelola oleh pusat dan penerima bantuan tersebut disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program Keluarga Harapan bertujuan untuk mengakhiri siklus kemiskinan, yang masih menjadi isu penting, sekaligus membentuk jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu.. PKH akan memberikan manfaat berjangka pendek serta berjangka panjang. Bagi jangka pendeknya, PKH bisa memberi *income effect* terhadap KPM yakni mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, sementara bagi jangka panjangnya yaitu pemutusan mata rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, dan memberi kepastian terhadap anak-anak terkait masa depan. Manfaat Tersebut sejalan dalam upaya mengefektifkan ketercapaian target Millenium Development Goals (MGDs).<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Kementrian Sosial, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," n.d., <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>.

<sup>10</sup>Febrina Sulivia Putri Yulizar, "Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan" (Universitas Lampung, 2022), 2.

Kementerian Sosial Republik Indonesia mengembangkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, dan telah terbukti cukup berhasil di berbagai tempat. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawa Cita Presiden Republik Indonesia, serta sebagai upaya sentral dalam penanggulangan kemiskinan di berbagai wilayah, inisiatif ini juga dijalankan. Kabupaten Luwu Utara, yang menjadi salah satu penerima bantuan sosial, berkomitmen untuk mengoptimalkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai sarana dalam mendorong perbaikan taraf hidup masyarakat. Sejumlah kelompok penerima manfaat PKH di Luwu Utara telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam mencapai tujuan tersebut.<sup>11</sup>

Merujuk dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa Tolada”. Fokus utama pada penelitian ini adalah PKH sebagai salah satu upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>11</sup>Lukman, “Miliki Lima Program Pemberdayaan, Kelompok PKH Di Sabbang Selatan Ini Punya Kas Rp 322 Juta,” 2020, <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/miliki-lima-program-pemberdayaan-kelompok-pkh-di-sabbang-selatan-ini-punya-kas-rp-322-juta>.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan peneliti pada latar belakang, tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara menurun sebesar 0,56% di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Ini sejalan dengan bergesernya Kabupaten Luwu Utara dari urutan ketiga berpindah pada urutan kelima dalam daftar daerah termiskin di Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik). Untuk itu peneliti merasa perlu melakukan penelitian tentang bagaimana peran PKH sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat miskin berdasarkan ekonomi islam.

1. Bagaimana pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tolada?
2. Bagaimana peran PKH dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Tolada?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan menjawab permasalahan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) di Desa Tolada.
2. Untuk mengetahui peran program keluarga harapan (PKH) sebagai salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Tolada.

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media untuk menambah pengetahuan dan informasi, khususnya mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pustaka untuk menambah wawasan mengenai inisiatif penguatan ekonomi masyarakat miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu, dapat menjadi referensi dalam karya tulis ilmiah selanjutnya.

### b. Bagi Masyarakat

Studi ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai upaya Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memperkuat ekonomi masyarakat miskin.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum melakukan penelitian ini, langkah awal yang dilakukan peneliti adalah melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain. Penelitian terdahulu yang relevan adalah penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya oleh para akademisi peneliti dengan tujuan meminimalisir objek penelitian yang sama serta untuk menemukan perbedaan penelitian yang telah ada sebelumnya.

Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Desi Pratiwi (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Pada Peserta PKH Desa Kedaton I Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur)”, dapat disimpulkan bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Kedaton I yang dimulai pada tahun 2014 dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan, tidak efektif karena penelitian menunjukkan bahwa beberapa penerima program tersebut telah dikategorikan sebagai orang yang mampu secara ekonomi. Hal ini terjadi karena rumah-rumah penerima bantuan dipilih dengan menggunakan data yang sudah ketinggalan zaman tanpa melakukan pemutakhiran data terlebih dahulu, sehingga sebagian penerima bantuan telah berubah status sosial ekonominya.<sup>12</sup> Adapun yang

---

<sup>12</sup>Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam” (IAIN METRO, 2020), 1.

menjadi kesamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti yaitu sama-sama berdasarkan ekonomi islam. Selain itu, keduanya menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan penerima PKH sebagai sumber informannya. Perbedaan antara kedua penelitian ini terletak pada fokus tujuan yang ingin dicapai. Penelitian yang dilakukan oleh Desi Pratiwi memusatkan perhatian pada pengukuran efektivitas dari Program Keluarga Harapan (PKH). Sementara itu, penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh mengenai kontribusi PKH dalam upaya meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan ini tidak hanya menilai efektivitas program, tetapi juga memahami bagaimana PKH dapat berperan dalam mengubah kondisi hidup keluarga miskin menjadi lebih baik.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Linda (2023) dengan judul “Efektivitas Program *Sustainable Development Goals (SDGS)* Dinas Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara” mengungkapkan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan program bantuan sosial yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) dapat dikatakan efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan.<sup>13</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu sama-sama melakukan penelitian pada program pemerintah sebagai upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara. Adapun

---

<sup>13</sup>Linda, “Efektivitas Program Sustainable Development Goals (SDGS) Dinas Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Utara” (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023), 73-76.

perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Linda berfokus pada *Sustainable Development Goals (SDGS)* dengan wilayah yang lebih luas yaitu Kabupaten Luwu Utara, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada peran Program Keluarga Harapan (PKH) pada salah satu Desa yang terletak pada Kabupaten Luwu Utara Yaitu Desa Tolada.

3. Febrina Sulivia Putri Yulizar (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan (Studi di Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)” mengungkapkan bahwa PKH berhasil menurunkan angka kemiskinan dengan terlihatnya perubahan perilaku serta kemandirian dari KPM dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, pemberian pelatihan kewirausahaan yang dilakukan pada pertemuan bulanan memberikan hasil kemandirian bagi KPM dengan memanfaatkan bentuk pelatihan tersebut berupa pembuatan kerajinan tangan dari barang bekas dan pembuatan makanan seperti keripik pisang, sehingga menghasilkan barang dengan nilai jual yang dapat membantu menambah penghasilan keluarga.<sup>14</sup> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek penelitiannya yaitu KPM PKH. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat dari lokasi penelitian, dimana penelitian oleh Febrina dilakukan di Kelurahan Way Dadi Kota Bandar Lampung. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berlokasi di Kabupaten Luwu Utara.

---

<sup>14</sup>Yulizar, “Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan”, 72-73.

## **B. Kajian Pustaka**

### 1. Program Keluarga Harapan (PKH)

#### a. Pengertian Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan inisiatif jaminan sosial yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui pemberian bantuan tunai. Namun, penerima manfaat dari program ini diwajibkan untuk mematuhi berbagai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Secara umum, PKH bertujuan untuk mencapai dua sasaran utama. Dalam jangka pendek, program ini berfungsi untuk meringankan beban ekonomi yang dihadapi oleh rumah tangga berpenghasilan rendah. Sementara itu, tujuan jangka panjang dari PKH adalah untuk memutus mata rantai kemiskinan yang sering kali diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga diharapkan generasi mendatang dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan yang mengikat.<sup>15</sup>

Program Keluarga Harapan (PKH), yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007, merupakan salah satu bentuk jaminan sosial yang dikenal secara internasional sebagai Conditional Cash Transfer (CCT). Program ini dirancang untuk mengurangi tingkat kemiskinan, khususnya kemiskinan kronis, yang sering menjadi tantangan utama bagi banyak negara berkembang. Efektivitas PKH telah terbukti dalam memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin, dengan cara memberikan bantuan tunai

---

<sup>15</sup>Rosmiati dkk, "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II" (KEMINFO RI, 2011): 18.

kepada rumah tangga yang kurang mampu. Fokus utama program ini adalah rumah tangga yang memiliki ibu hamil dan anak-anak, dengan tujuan untuk meningkatkan akses mereka terhadap fasilitas layanan kesehatan (FASKES) dan fasilitas layanan pendidikan (FASDIK). Dengan adanya program ini, diharapkan bahwa penerima manfaat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan melalui akses yang lebih baik terhadap layanan publik yang esensial. Dengan mempertahankan tingkat kesejahteraan sosial mereka, manfaat PKH juga mulai mendorong inklusi lansia dan penyandang disabilitas.<sup>16</sup>

Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) didukung sebagian oleh penerapan PKH. Pengurangan kemiskinan dan kelaparan; kesetaraan gender; pendidikan dasar; pengurangan angka kematian bayi dan balita; dan pengurangan angka kematian ibu adalah lima komponen MDGs yang akan diupayakan oleh PKH.<sup>17</sup>

Keluarga Miskin (KM) didorong untuk menggunakan dan memiliki akses terhadap layanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan bantuan melalui PKH. Selain itu, KM juga didorong untuk menggunakan berbagai program perlindungan sosial lainnya yang sedang berlangsung dan saling melengkapi. PKH dimaksudkan untuk menjadi pusat penghubung dan pusat keunggulan untuk mengurangi kemiskinan, yang

---

<sup>16</sup>KEMENSOS, "Program Keluarga Harapan (PKH)" (Kementerian Sosial, n.d.), <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

<sup>17</sup>Zuchri Abdussamad, *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle of Poverty from A Public Servise Perspective*, 1st ed. (Syakir Media Press, 2023): 321.

menyatukan berbagai inisiatif nasional untuk pemberdayaan dan perlindungan sosial.<sup>18</sup>

b. Tujuan program keluarga harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan bertujuan untuk:

- 1) Mengangkat Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Melalui Akses Terhadap Sumber Daya Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap berbagai sumber daya yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan. Dengan menghubungkan mereka dengan berbagai fasilitas dan layanan ini, diharapkan mereka dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Pemberian akses yang efisien dan efektif ini akan berkontribusi pada peningkatan taraf hidup secara menyeluruh bagi kelompok sasaran.

- 2) Mengurangi Beban Keuangan dan Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Berpendapatan Rendah

Upaya ini dirancang untuk meringankan tekanan finansial yang dihadapi oleh rumah tangga dengan pendapatan rendah dan rentan. Dengan adanya intervensi yang tepat, diharapkan dapat mengurangi beban biaya hidup mereka serta meningkatkan potensi pendapatan mereka. Hal ini tidak hanya akan membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari tetapi juga memberikan peluang bagi

---

<sup>18</sup>KEMENSOS, “Program Keluarga Harapan (PKH).”

keluarga tersebut untuk meningkatkan kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan.

3) Mendorong Perubahan Perilaku dan Peningkatan Kemandirian Keluarga dalam Mengakses Layanan Sosial

Program ini juga berupaya untuk mendukung keluarga penerima manfaat dalam mengadopsi pola perilaku baru yang lebih produktif serta meningkatkan kemandirian mereka dalam menggunakan layanan yang tersedia di bidang kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan (Marwing et al., 2022; Mujahidin & Majid, 2022). Dengan memberikan informasi yang relevan dan pelatihan yang memadai, diharapkan mereka dapat menjadi lebih mandiri dan efisien dalam mengakses serta memanfaatkan layanan-layanan tersebut.

4) Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Kemiskinan

Inisiatif ini berfokus pada upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial dan tingkat kemiskinan di masyarakat. Melalui berbagai program yang dirancang untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan dan keterbatasan sumber daya, diharapkan dapat tercipta sebuah masyarakat yang lebih seimbang dan inklusif (Ilyas, 2022; Yusmad et al., 2024). Pengurangan kesenjangan ini akan membawa dampak positif terhadap kesejahteraan sosial secara umum.

5) Edukasi tentang Manfaat Produk dan Layanan Keuangan Formal kepada Keluarga Penerima Manfaat

Salah satu aspek penting dari program ini adalah memberikan pemahaman kepada keluarga penerima manfaat mengenai keuntungan dari produk dan layanan keuangan formal. Edukasi ini bertujuan untuk menginformasikan mereka tentang

berbagai opsi keuangan yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya secara efektif (Alam et al., 2023; Rifuddin et al., 2022; Sulaeman et al., 2023). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang produk keuangan, diharapkan keluarga penerima manfaat dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan meraih manfaat ekonomi yang lebih besar.<sup>19</sup>

c. Mekanisme pelaksanaan program keluarga harapan (PKH)

Fungsi utama PKH adalah untuk mendistribusikan dana dalam bentuk bantuan tunai bersyarat. PKH beroperasi dalam enam (6) tahap operasi yang saling terkait. Keenam tahapan di bawah ini dapat menjadi implementasi utama PKH:

- 1) Penyediaan data calon peserta PKH (data berdasarkan BPS dan dikumpulkan dari Basis Data Terpadu yang dimulai pada tahun 2012).
- 2) Menemukan calon peserta PKH dan mengidentifikasi mereka (Penentuan Sasaran).
- 3) Memverifikasi keakuratan, konsistensi, dan perubahan informasi tentang calon peserta PKH (validasi).
- 4) Pembayaran uang tunai, yang meliputi: a) Pembayaran awal yang dilakukan pada saat selesainya validasi peserta, b) Pembayaran selanjutnya yang bergantung pada hasil verifikasi peserta lainnya.
- 5) Konfirmasi pemenuhan kewajiban.
- 6) Revisi data..<sup>20</sup>

d. Kriteria penerima program keluarga harapan (PKH)

---

<sup>19</sup> Puslitbang Kesos and Pranata Pembangunan UI, *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*, 1st ed. (PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI, 2020), 20.

<sup>20</sup> Nandia Saskhita Putri, "Analisis Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Mojoranu)" (IAIN TULUNG AGUNG, 2019), 37-38.

Komponen kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial merupakan kriteria peserta PKH. Setiap komponen dijelaskan seperti yang tertera di bawah ini:

1) Elemen kesehatan

Berikut ini adalah persyaratan bagi penerima PKH komponen kesehatan:

a) Ibu yang sedang menyusui, nifas, atau hamil.

Seorang wanita yang berada dalam fase kehamilan, masa nifas, atau periode menyusui merujuk pada kondisi di mana individu tersebut sedang mengalami proses kehamilan dengan jumlah kehamilan yang mungkin telah ditentukan batasnya atau masih berada dalam tahap menyusui anaknya. Kehamilan, masa nifas, dan periode menyusui merupakan fase-fase penting dalam siklus reproduksi wanita yang memerlukan perhatian khusus terkait kesehatan dan nutrisi, mengingat adanya perubahan fisiologis dan kebutuhan spesifik yang harus dipenuhi untuk mendukung kesehatan ibu serta perkembangan optimal bayi.

b) Anak usia dini.

Anak-anak yang belum terdaftar di sekolah dan berusia antara 0 dan 6 tahun dianggap sebagai anak usia dini.

2) Komponen pendidikan

Anak-anak yang berada dalam rentang usia sekolah menjadi kriteria penting dalam penentuan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada komponen pendidikan. Definisi "anak usia sekolah" mencakup individu yang berusia antara 6 hingga 21 tahun yang belum menyelesaikan kewajiban pendidikan dasar. Dengan kata lain, anak-anak dalam kategori ini adalah mereka yang secara hukum masih dalam masa pendidikan wajib dan belum

menyelesaikan jenjang pendidikan yang ditetapkan sebagai syarat minimal dalam sistem pendidikan nasional. Hal ini menegaskan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi kelompok usia ini, yang merupakan salah satu fokus utama dalam program sosial pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan belajar anak-anak dari keluarga kurang mampu.

1) Komponen kesejahteraan sosial

Kriteria penerima PKH kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

a) Lanjut usia

Seseorang berusia lanjut yang tercatat dalam kartu keluarga yang sama dan berada dalam keluarga.

b) Penyandang disabilitas berat

Mereka yang diklasifikasikan sebagai penyandang disabilitas berat adalah mereka yang tinggal dalam satu keluarga, terdaftar dalam satu kartu keluarga, tidak dapat melakukan tugas sehari-hari, dan/atau bergantung pada orang lain selama hidupnya untuk mempertahankan hidup.

e. Hak dan kewajiban keluarga penerima manfaat PKH

1) Hak KPM PKH

KPM PKH berhak mendapatkan:

a) Bantuan sosial PKH.

b) Pendampingan sosial PKH.

c) Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial.

d) Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

2) Kewajiban KPM PKH

Kewajiban KPM PKH terdiri dari:

- a) Komponen kesehatan terdiri dari ibu hamil/nifas/menyusui, anak usia dini (0-6 tahun) yang belum bersekolah wajib memeriksakan kesehatan pada fasilitas/layanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan.
- b) Komponen pendidikan terdiri dari anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, wajib mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif.
- c) Komponen kesejahteraan sosial terdiri dari lanjut usia dan/atau penyandang disabilitas berat, wajib mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan yang dilakukan minimal setahun sekali.
- d) KPM hadir dalam pertemuan kelompok atau pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) setiap bulan.
- e) Seluruh anggota KPM harus memenuhi kewajibannya, kecuali jika terjadi keadaan kahar (*force majeure*).
- f) KPM yang tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi.<sup>21</sup>
- f. Besaran bantuan PKH

Nominal bantuan PKH sesuai kategori 2023 sebagai berikut:

- 1) Ibu hamil/nifas: Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3.000.000 per tahunnya.

---

<sup>21</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)," 2021, <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>.

- 2) Anak usia dini/balita: Rp750.000 untuk setiap tahap atau Rp3.000.000 per tahunnya.
- 3) Lansia: Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya.
- 4) Penyandang disabilitas: Rp600.000 untuk setiap tahap atau Rp2.400.000 per tahunnya.
- 5) Anak sekolah tingkat SD/ sederajat: Rp225.000 untuk setiap tahap atau Rp900.000 per tahunnya.
- 6) Anak sekolah tingkat SMP/ sederajat: Rp375.000 untuk setiap tahapnya atau Rp1.500.000 per tahunnya.
- 7) Anak sekolah tingkat SMA/ sederajat: Rp500.000 untuk setiap tahap atau Rp2.000.000 per tahunnya.<sup>22</sup>

## 2. Kemiskinan

### a. Definisi kemiskinan

Menurut etimologinya, kata “kemiskinan” berasal dari kata “miskin”, yang berarti kekurangan dan tidak memiliki apa-apa. Kemiskinan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial dari sudut pandang kebutuhan minimal untuk hidup layak (BPS dan DEPSOS). Selain itu, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi yang berada di bawah garis nilai standar, yang juga dikenal sebagai ambang batas kemiskinan, untuk kebutuhan dasar makanan dan non-makanan.

---

<sup>22</sup>Seksi Informasi Hukum and Ditama Binbangkum, “Bansos PKH 2023 (1),” 2023, 2–4, [https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931-ac4b974799f4/Bansos PKH 2023.pdf](https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931-ac4b974799f4/Bansos_PKH_2023.pdf).

Berdasarkan pendapat BAPPENAS, kemiskinan merupakan suatu keadaan yang dirasakan individu ataupun sekelompok individu yang tidak mempunyai kemampuan melakukan pengaturan kehidupannya menuju tingkat yang di asumsikan manusiawi. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar merupakan konsep penting dalam penilaian kemiskinan yang dikenal sebagai metode kebutuhan dasar. Dalam kerangka metode ini, kemiskinan dipahami sebagai keadaan ketidakmampuan untuk memperoleh atau membiayai kebutuhan-kebutuhan fundamental yang meliputi kebutuhan makanan serta kebutuhan non-makanan. Dengan kata lain, individu dianggap miskin jika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan esensial yang diperlukan untuk hidup secara layak, baik dalam aspek konsumsi pangan maupun dalam aspek kebutuhan non-pangan yang penting seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Metode kebutuhan dasar ini mengukur kemiskinan berdasarkan kemampuan seseorang untuk mencapai standar minimum yang dianggap penting untuk kesejahteraan hidup. Garis kemiskinan adalah titik di mana untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut secara maksimal, ditentukan dengan menggunakan jumlah rupiah tertentu. Oleh karena itu, mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dianggap miskin.<sup>23</sup>

Islam memandang kemiskinan sebagai masalah yang serius, baik secara konseptual maupun praktis. 'Fakir' dan 'miskin' adalah istilah yang umum digunakan untuk menggambarkan kemiskinan. Saad Ibrahim mendefinisikan kemiskinan, atau "fakir", sebagai suatu keadaan di mana kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi.

---

<sup>23</sup>Kementerian PPN/Bappenas, "Tingkat Kemiskinan," 2023, [peppd.bappenas.go.id/media/infograph?indikator=tingkat\\_kemiskinan&wilayah=nasional](http://peppd.bappenas.go.id/media/infograph?indikator=tingkat_kemiskinan&wilayah=nasional).

Dalam Al-Qur'an, kata “miskin” sering digunakan untuk menyebut seseorang yang tidak berdaya. Dalam ekonomi Islam, mereka yang membutuhkan dan mereka yang miskin memiliki kewajiban untuk membantu satu sama lain. Hal ini penting agar arahan penggunaan sumber daya seperti zakat, sedekah, dan infak memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan yang dihasilkan dari kesadaran sosial masyarakat.<sup>24</sup>

#### b. Penyebab kemiskinan

Penyebab dari karakteristik ini berbeda-beda, tetapi variabel-variabel yang menyebabkan kemiskinan di kota pada dasarnya sama dengan di desa. Sebagai contoh, tingginya biaya hidup dan tingkat pengangguran di kota sering kali menjadi penyebab komponen ketidakberdayaan.<sup>25</sup> Menurut Isdjoyo, sebagaimana dirujuk oleh Indra Maipita, terdapat sejumlah faktor penyebab kemiskinan baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Dalam konteks kemiskinan di desa, sejumlah faktor utama dapat diidentifikasi sebagai penyebab utama. Faktor-faktor tersebut meliputi kurangnya akses terhadap pendidikan yang memadai, terbatasnya peluang kerja, serta minimnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ini berkontribusi pada kondisi kemiskinan di pedesaan, yang seringkali diperburuk oleh rendahnya produktivitas pertanian dan ketergantungan pada sektor pertanian tradisional yang kurang berkembang. Selain itu, masalah sosial seperti kurangnya akses terhadap layanan kesehatan dan ketidakmampuan untuk memperoleh modal usaha juga turut memperparah kondisi kemiskinan di desa.:

---

<sup>24</sup>Ismail, “Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam,” *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2020), 114.

<sup>25</sup>Indra Maipi, *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*, ed. Muhammad Arif (Absolute Media, 2013), 67-68.

- 1) Ketidakberdayaan. Rendahnya harga produk mereka, tingginya biaya sekolah, dan kelangkaan peluang karier, semuanya berkontribusi pada kondisi ini.
  - 2) Tingkat pendidikan yang rendah dan terisolasi, kurangnya pengetahuan, transportasi yang terbatas, dan kesulitan untuk mendapatkan kredit.
  - 3) Modal yang sedikit, serta lahan pertanian yang terbatas menjadi penyebab rendahnya pendapatan.
  - 4) Kerentanan, sulitnya mendapatkan pekerjaan, pekerjaan musiman, dan bencana alam, membuat mereka menjadi rentan dan miskin.
  - 5) Sikap pasrah dan tidak memiliki keinginan untuk bekerja keras membuat mereka menjadi miskin.
3. Upaya pemberdayaan fakir miskin dalam perspektif ekonomi islam

Dalam Islam, ketidakadilan sosial dan kemiskinan adalah masalah yang perlu ditangani secara serius. Oleh karena itu, Islam memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai masalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, yang mencakup konsepsi dan aplikasinya. Hal ini berbeda dengan agama-agama lain yang memberikan penjelasan dan kerangka kerja yang terbatas untuk masalah ini.

Sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut:

.. تَوَّابٌ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ لَكُمْ رَسُولًا نَذِيرًا ۝ وَالَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَالْإِيمَانِ أَتَمْنَوْنَ إِذْ تُبْعَثُونَ ۚ وَذُرِّيَّةَ مَنْ حَكَمَ لَوْ لَمْ يَلِدْ يُسْتَعْتَابُ ۚ وَرَبُّكُمْ عَلِيمٌ ۝

Terjemahannya:

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Ma'idah/5: 2).<sup>26</sup>

Menurut Wibisono, yang dikutip oleh Sri Budi Cantika Yuli, pendekatan Islam dalam mengurangi kemiskinan memiliki sejumlah konsep terkait kebijakan publik yang dapat menjadi kerangka kerja yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan sekaligus menciptakan lapangan kerja yaitu:

- a. Islam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berpihak pada kaum miskin yang menguntungkan masyarakat secara keseluruhan (*pro-poor growth*). Islam menggunakan dua strategi utama untuk mendorong pertumbuhan yang menguntungkan masyarakat miskin: Islam melarang riba dan mendorong aktivitas sektor riil. Pelarangan riba akan berhasil menekan inflasi, menjaga daya beli masyarakat dan mendorong stabilitas ekonomi. Selain itu, Islam menggunakan kerja sama bisnis dan ekonomi untuk menyalurkan kekayaan ke dalam usaha-usaha yang menguntungkan.
- b. Islam mendorong penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin, atau pengembangan anggaran negara yang melayani kepentingan rakyat (*pro-poor budgeting*). Disiplin fiskal yang ketat, administrasi yang baik, dan mengalokasikan seluruh anggaran negara untuk kepentingan masyarakat adalah tiga kunci utama dari anggaran pro-poor yang telah memandu sejarah Islam.
- c. Islam mendorong pembangunan infrastruktur yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat secara keseluruhan, yang dikenal sebagai infrastruktur yang

---

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Wali, 2016): 106.

mendukung kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah (*pro-poor infrastructure*). Dalam pandangan Islam, investasi dalam pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya penting untuk kesejahteraan umum, tetapi juga berperan dalam meningkatkan potensi ekonomi dan efisiensi melalui dampak eksternalitas positif. Infrastruktur yang dirancang dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mengurangi kesenjangan sosial dengan memfasilitasi akses yang lebih baik terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.

- d. Islam mendorong penyediaan layanan publik yang mendasar (*pro-poor public services*) yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Islam memberikan prioritas tinggi pada tiga sektor pelayanan publik: kesehatan, pendidikan, dan birokrasi. Islam memandang birokrasi memiliki kewajiban untuk melayani kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.
- e. Prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan dan distribusi pendapatan yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor income distribution*) menganjurkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan mereka yang kurang mampu. Dalam Islam, terdapat tiga alat utama untuk mengalokasikan pendapatan: zakat, peraturan kepemilikan properti, dan menganjurkan qardul hasan, infak, dan wakaf.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Sri Budi Cantika Yuli, "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam," *Ekonomika-Bisnis* 4 (2013): 108–109.

Istilah “pemberdayaan masyarakat miskin” mengacu pada berbagai inisiatif di bidang sosial-budaya, politik, dan ekonomi yang bertujuan untuk memperkuat, memberdayakan, dan mengintegrasikan masyarakat miskin ke dalam masyarakat dan negara dalam rangka menciptakan kehidupan yang cerdas, maju, adil, makmur, dan aman. Pemberdayaan kaum miskin mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, serta mendorong terjadinya proses demokratisasi di bidang sosial budaya, politik, dan ekonomi.

Pemberdayaan kaum miskin dilaksanakan dengan dua cara secara bersamaan, sebagai berikut:

- a. Dengan mengembangkan keterampilan mereka, misalnya melalui magang, kursus kewirausahaan, pelatihan keterampilan kerja, dan sebagainya.
- b. Dengan memberikan mereka akses ke sumber daya keuangan, politik, dan sosial budaya sehingga mereka dapat memanfaatkan kemampuan yang telah mereka peroleh.

Kedua metode ini digunakan untuk pemberdayaan kaum miskin, yang biasanya tidak berpendidikan tinggi dan tidak memiliki akses ke sumber daya ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kaum miskin memiliki pengetahuan dan keterampilan yang rendah, memiliki sedikit sumber daya, dan memiliki kemungkinan kecil untuk mendapatkan sumber daya untuk mengatasi kemiskinan mereka.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Merphin Panjaitan, *Memberdayakan Kaum Miskin* (BPK Gunung Mulia, 2000): 16-17.



serta akses pendidikan dan kesehatan merupakan aspek fundamental dari komitmen Islam terhadap nilai-nilai persaudaraan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan dapat memastikan distribusi sumber daya dan layanan

---

<sup>29</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Wali, 2016): 541.

publik dilakukan secara merata dan adil, agar setiap individu dapat menikmati hak-haknya secara setara dan terjamin.<sup>30</sup>

Salah satu negara yang mengharapkan perkembangan penduduknya adalah Indonesia. Kesejahteraan telah menjadi tujuan utama negara ini sejak kemerdekaannya. Kesejahteraan dan fenomena kemiskinan memiliki kaitan yang erat. Pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan, dan mengakhiri kemiskinan hanyalah salah satu dari sekian banyak program pemerintah. Karena memang benar bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.<sup>31</sup>

#### 4. Maqashid al-syariah

Kata *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu mashdar mimi dari kata *qasada-yaqshudu-qashdan-maqshadan*. Menurut ibn al-Manzhur (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti *istiqamah al-thariq* (keteguhan pada satu jalan), dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan). Selain itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth 'adam al-ifraath wa al-tafriith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit),<sup>32</sup> seperti pernyataan seseorang, “kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata”, artinya mengambil jalan tengah

---

<sup>30</sup> Desi Pratiwi, “Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam”, 33-34.

<sup>31</sup> Nur Isna, “Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)” (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2020), 2.

<sup>32</sup> Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn Al-Manzhur, *Lisaan Al-'Arab*, 3rd ed. (Beirut: Daar Shaadir, 1441), 353-355.



Kata “*maqashid al-syariah*” mengacu pada maksud dan panduan hukum shara', yang harus diikuti oleh semua mujtahid. mendiskusikan tujuan dan misteri *Maqaashid al-Syariah* yang paling utama, yaitu untuk memajukan umat manusia.<sup>36</sup> *Maqashid al-syariah* dikreditkan kepada cendekiawan Muslim Imam al-Haramain, yang membaginya menjadi tiga bagian: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Beliau juga berjasa dalam membagi *dharuriyyat* menjadi *al-din*, *al-nafs*, *al-'aql*, *al-nasl*, dan *al-mal*, yang merupakan lima jenis *dharuriyyat al-khams*. *Al-dharuriyyat al-khams* pertama kali dikategorikan ke dalam empat kategori oleh al-Ghazali (1971), yang juga seorang murid Haramain: *hifdzu al-nafs*, *hifdzu al-'aql*, *hifdzu al-budh'i*, dan *hifdzu al-mal*. *Hifdzu al-din* tidak ada dalam bagian ini, namun al-Ghazali akhirnya memasukkannya ke dalam *al-Mustashfa*, buku berikutnya (al-Ghazali, 1993). Al-Syathibi adalah cendekiawan Muslim yang kemudian menyusun maqashid al-syariah yang rapi. Dalam kajian ushul fiqh, kontribusinya terhadap maqashid al-syariah sejalan dengan Imam Syafi'i (al-Raisuni, 2005). Karena *maqashid al-syariah* begitu mudah dipahami dan diatur di bawah bimbingan al-Syathibi, beberapa sarjana bahkan memujinya sebagai pencipta ide-ide dasar bidang ini.<sup>37</sup>

Asy-Syathibi mengklaim bahwa PKH memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar. Masalah dicapai untuk kepentingan Allah SWT dan manusia. Niat manusia harus dipandu oleh ajaran Allah SWT dan bukan oleh hawa nafsu. Masalah diklasifikasikan ke dalam tiga kategori: *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan

---

<sup>36</sup>Busyro, *Maqaashid Al-Syariah*, 1st ed. (KENCANA, 2019), 12.

<sup>37</sup>Ubbadul Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila," *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, no. 1 (2020): 23–35.

*Tahsiniyyat*, menurut Asy-Syatibi. *Dharuriyyat* memiliki lima manfaat: menjaga harta benda, agama, jiwa, keturunan, dan akal.

1) *Maslahah al-dharuriyyat*

Untuk mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat, mukalaf, atau manusia, harus memenuhi atau mempraktekkan *maslahah dharuriyyat*. Apabila hal ini tidak ada, maka kegiatan yang berkaitan dengan makan, minum, shalat, puasa, dan bentuk ibadah lainnya akan berakibat pada kemudharatan atau bahkan kematian. *Maslahah al-dharuriyyat* meliputi:

- a) Memelihara/menjaga agama (*hifdzu al-din*). Menurut Al-Ghazali (1971) yang dikutip oleh Ubbadul Adzkiya', segala perbuatan yang dapat mencegah perbuatan keji maka termasuk dalam kepentingan agama, dengan dasar QS. Al-‘Ankabut/29 : 45.

أَلَّا يَحْيَا مَا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْهِ عَرَبِيًّا مُبِينًا ۚ

أَلَّا يَحْيَا مَا كَرِهَ اللَّهُ لِعِبَادِهِ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نُنزِّلُ عَلَيْكَ مِنْ لَدُنْهِ عَرَبِيًّا مُبِينًا ۚ

Terjemahannya :

“Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur’an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-‘Ankabut/29 : 45)<sup>38</sup>

<sup>38</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Wali, 2016): 401.



cara-cara yang tidak jujur, termasuk mencuri, korupsi, dan menggunakan cara-cara yang melanggar hukum yang bertentangan dengan hukum nasional.

2) *Maslahah al-hajiyat*

---

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: Wali, 2016): 285.

*Maslahah al-hajiyyat* adalah masalah sekunder yang harus ada untuk membenarkan tindakan yang diambil. Namun, ketika tidak ada, ia tidak mencederai, meskipun dapat mempengaruhi adanya masalah. Al-Syathibi, misalnya, menjelaskan transaksi fikih salam, musaqah, qiradh, dan muamalah dalam hubungan antar manusia. Tujuan umum dari istilah ini adalah untuk menghilangkan rintangan, meringankan beban, dan memudahkan urusan (al-Syathibi).

### 3) *Maslahah al-tahsiniyyat*

Istilah kontemporeranya yaitu tersier, yaitu perilaku atau kualitas yang biasanya diatur oleh adat istiadat masyarakat, secara moral, berasal dari perasaan yang kuat, dan tidak bertentangan dengan akal sehat. *Al-tahsiniyyat* adalah tambahan yang bersifat opsional. Al-Syathibi memberikan beberapa contoh, seperti larangan membeli dan menjual barang yang kotor dan penggunaan rumput dan air secara efisien.<sup>40</sup>

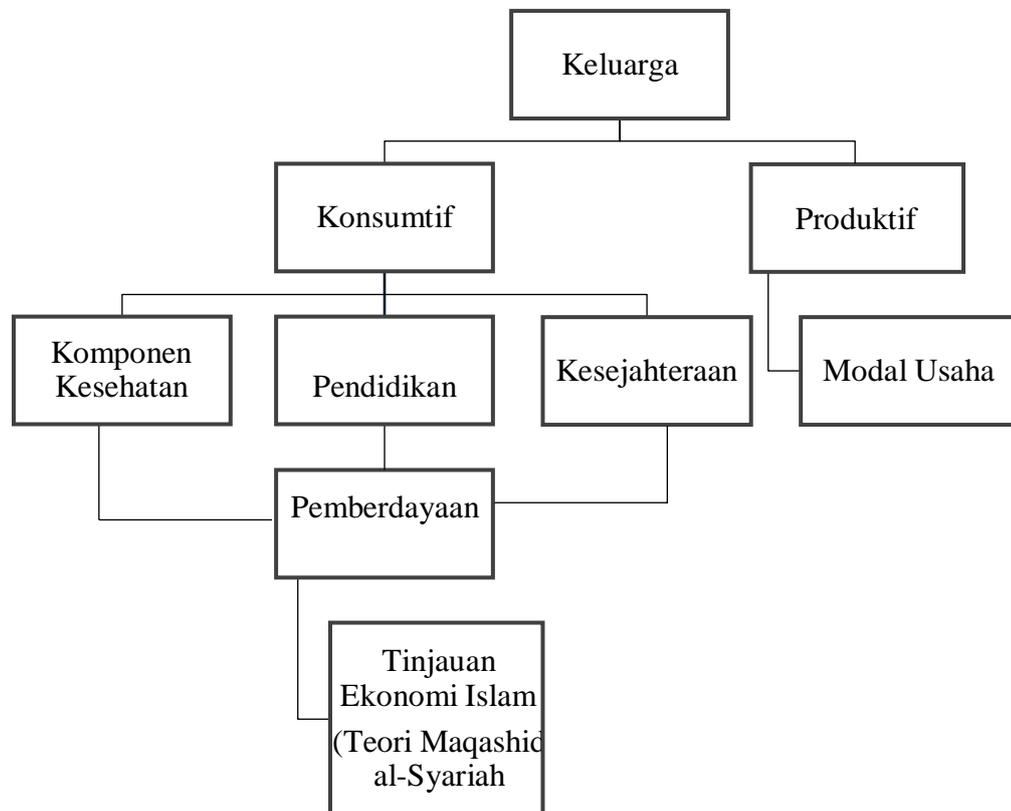
## C. Kerangka Berpikir

Dalam bukunya yang berjudul *Business Research* pada tahun 1992, Uma Sekaran membuat argumen bahwa kerangka kerja adalah representasi konseptual dari hubungan antara teori dan sejumlah variabel yang telah ditentukan sebagai masalah yang signifikan.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Adzkiya', "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila."

<sup>41</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 2nd ed. (Bandung: ALFABETA, 2021), 95.

**Gambar 2.1** Kerangka Pikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan mengenai gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi saat sekarang.<sup>42</sup> Ketika meneliti objek alami, pendekatan kualitatif digunakan di mana peneliti berfungsi sebagai instrumen kunci.<sup>43</sup> Definisi lain dari pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa pernyataan lisan atau tertulis dari subjek atau perilaku yang terlihat.<sup>44</sup> Pendekatan ini dipilih peneliti berdasarkan tujuan untuk mendapatkan gambaran secara detail mengenai peran kebijakan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Populasi adalah subjek atau objek yang berada pada wilayah topik penelitian dan memenuhi persyaratan khusus yang berkaitan dengan orang, kelompok, atau organisasi yang membentuk unit penelitian atau unit analisis yang sedang dipelajari (individu, kelompok, atau organisasi).<sup>45</sup> Teknik sampling yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah

---

<sup>42</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

<sup>43</sup>Rokhmat Subagiyo, *Metode Penelitian Islam: Konsep & Penerapan* (Jakarta: Alim's Publishing, 2017), 232.

<sup>44</sup>Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 4.

<sup>45</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 1st ed. (Syakir Media Press, 2021), 136.

pendekatan pengambilan sampel sumber data yang mempertimbangkan faktor-faktor spesifik, seperti pendapat orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diteliti.<sup>46</sup>

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Data primer

Sumber data utama adalah data yang diperoleh dari kata-kata dan tindakan dari subjek melalui wawancara, dalam bentuk catatan-catatan, pengambilan foto, perekaman video atau suara yang dikumpulkan dari pihak yang terlibat langsung dalam program keluarga harapan (PKH) yaitu:

- a. Informan kunci: unit pendamping PKH.
- b. Informan utama: keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH).

### 2. Data sekunder

Peneliti memperoleh data sekunder dari literatur dan buku yang relevan dengan upaya pemberdayaan masyarakat, serta data dari instansi pemerintah yang relevan dengan penelitian ini.

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian bertempat di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Wilayah Desa Tolada terletak pada wilayah dataran rendah dengan luas wilayah 1.945 ha dengan jumlah penduduk Desa Tolada sekitar 4.200

---

<sup>46</sup>Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 2nd ed. (Bandung: ALFABETA, 2021), 133.

jiwa. Jumlah itu terbilang sangat besar dibanding desa lainnya.<sup>47</sup> Alasan memilih lokasi di Desa Tolada ini karena program keluarga harapan (PKH) di desa ini sudah terhitung lama dan beberapa keluarga penerima manfaat (PKM) sudah tidak lagi terdaftar sebagai penerima program keluarga harapan (PKH). Selain itu, peneliti ingin mengetahui apakah program ini telah mampu memenuhi perannya dalam membantu meningkatkan pendidikan dan kesehatan keluarga penerima manfaat (KPM). Penelitian dilakukan sejak senin tanggal 3 Juni 2024 hingga 30 Juni 2024.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Tahap krusial dalam proses penelitian adalah fase pengumpulan data. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai teknik dan metode pengumpulan data, para peneliti tidak akan mampu memperoleh data yang memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan. Pemilihan dan penerapan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya akurat dan valid, tetapi juga dapat diandalkan untuk menghasilkan temuan yang relevan dan bermanfaat dalam konteks penelitian. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:

##### **1. Observasi**

Proses pengumpulan data secara metodis dan disengaja melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang diselidiki dikenal sebagai observasi. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan menggunakan metode terstruktur atau non-partisipan.

##### **2. Wawancara**

---

<sup>47</sup>Chalik Mawardi, "Tribun Wiki: Sejarah Dan Profil Singkat Desa Tolada," *Tribun-Timur.com*, 2020.

Percakapan dengan tujuan eksplisit untuk mengumpulkan data untuk teori wawancara disebut wawancara. Wawancara digunakan untuk mempelajari pemikiran dan perspektif orang tentang topik yang tidak dapat dipelajari oleh para akademisi melalui observasi. Wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang informasinya sudah diketahui sejak awal. Daftar pertanyaan disiapkan sebelumnya oleh peneliti yang bertindak sebagai pewawancara dengan informan.<sup>48</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Karya-karya seperti buku, surat kabar, dan karya-karya tertulis dapat dianggap sebagai dokumen. Informasi yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara-yang berasal dari catatan dan dokumen-dilengkapi dengan materi ini.<sup>49</sup>

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penelitian tetapi juga sebagai pengumpul data. Peneliti berperan sebagai "instrumen manusia" yang memiliki tanggung jawab untuk menentukan dan memusatkan fokus penelitian. Selain peran sentral yang dimainkan oleh peneliti, terdapat instrumen tambahan yang digunakan untuk mendukung proses pengumpulan data. Instrumen pendukung ini meliputi pedoman wawancara, buku catatan, dan alat perekam. Pedoman wawancara membantu peneliti dalam merancang dan mengarahkan sesi wawancara secara sistematis,

---

<sup>48</sup>Uma Sekaran dan Roger Bougie, *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, 6th ed. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), 138.

<sup>49</sup>Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. 146-150.

sementara buku catatan dan alat perekam berfungsi untuk merekam dan mendokumentasikan data yang diperoleh selama proses wawancara. Semua elemen ini bekerja secara sinergis untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat dan relevan dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman (1984), Analisis data interaktif memerlukan pelaksanaan yang menyeluruh untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan yang memadai. Proses ini mencakup beberapa aktivitas krusial: pertama, reduksi data, di mana data yang terkumpul disaring dan dipilih untuk mengidentifikasi informasi yang paling relevan; kedua, penyajian data, yang melibatkan penyusunan dan penyajian data dalam format yang mudah dipahami agar pola dan tren yang signifikan dapat diidentifikasi; dan ketiga, penarikan kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan tahap di mana hasil analisis diuji dan divalidasi untuk memastikan akurasi dan konsistensi temuan. Keseluruhan proses ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif terhadap data yang diteliti.<sup>50</sup>

### **1. Reduksi data**

Mengingat volume data yang besar yang dikumpulkan dari lapangan, diperlukan proses reduksi data untuk tujuan analisis. Proses reduksi data ini mencakup beberapa langkah penting, yaitu merangkum informasi, memilih elemen-elemen utama, memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang signifikan, serta

---

<sup>50</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2012), 333.

mengidentifikasi tema-tema dan pola-pola yang relevan. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi bentuk yang lebih terstruktur dan bermakna, sehingga memudahkan dalam proses interpretasi dan analisis lebih lanjut.

## 2. Menyajikan data

Menyajikan data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data selesai dilakukan. Salah satu metode efektif dalam menyajikan data adalah melalui penulisan naratif. Metode ini memungkinkan penyampaian informasi yang lebih terstruktur dan mendetail, sehingga mempermudah pemahaman mengenai apa yang telah terjadi serta memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk kegiatan atau penelitian di masa depan. Dengan menyajikan fakta-fakta secara sistematis dan naratif, peneliti dapat memperoleh wawasan yang mendalam, yang pada gilirannya membantu dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis yang lebih terarah.

## 3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan yang dicapai merupakan hasil yang inovatif dan belum pernah ada sebelumnya. Hasil dari penelitian ini bisa berupa gambaran atau pemaparan mengenai suatu objek yang sebelumnya belum teridentifikasi secara jelas, namun setelah dilakukan penelitian, objek tersebut menjadi lebih terang dan terdefinisi dengan baik. Kesimpulan yang dianggap kredibel adalah kesimpulan yang didasarkan pada data dan bukti yang dapat dipercaya serta konsisten, sehingga memberikan validitas dan keandalan pada hasil penelitian tersebut.

### **G. Uji Keabsahan Data**

Triangulasi adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memverifikasi kebenaran data. Triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk memverifikasi keakuratan data antara objek penelitian dan hasil wawancara. Dalam konteks penilaian kredibilitas, triangulasi merujuk pada proses membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber pada waktu dan metode yang berbeda. Untuk memastikan keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data yang dikumpulkan dari berbagai sumber dengan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya adalah untuk memastikan konsistensi hasil yang diperoleh sesuai dengan sumber data yang ada. Proses ini penting untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan penelitian, dengan cara memastikan bahwa informasi yang diperoleh tidak hanya akurat tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara objektif.

Data dalam penelitian kualitatif harus diverifikasi sebagai data yang valid sebelum dapat dianggap sebagai bagian dari studi ilmiah. Keabsahan data dilakukan untuk menguji data yang terkumpul dan menunjukkan apakah penelitian tersebut memang ilmiah. Uji konfirmabilitas (triangulasi) adalah salah satu penilaian keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>51</sup> Pendekatan triangulasi merupakan sebuah konsep metodologis yang krusial dalam penelitian kualitatif, dan penting bagi para peneliti dalam bidang ini untuk memahaminya

---

<sup>51</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), 270.

secara mendalam. Tujuan utama dari penerapan triangulasi adalah untuk memperkaya dimensi teoretis, metodologis, dan interpretatif dari hasil penelitian kualitatif. Dalam praktiknya, triangulasi dapat dipahami sebagai sebuah proses verifikasi data yang melibatkan pemanfaatan berbagai sumber informasi, metode penelitian, dan kerangka waktu yang berbeda. Dengan demikian, triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian dengan menggabungkan perspektif yang beragam dalam proses analisis data.

#### 1. Triangulasi sumber

Memverifikasi data yang dikumpulkan dari beberapa sumber adalah salah satu cara untuk menilai kebenaran data. Setelah data dievaluasi, maka dapat diambil kesimpulan yang kemudian dikonfirmasi (*member check*) oleh tiga sumber data.

#### 2. Triangulasi teknik

Dengan menerapkan berbagai metode dalam verifikasi data yang bersumber dari referensi yang sama, prosedur penelitian dapat dilakukan melalui triangulasi. Sebagai contoh, kombinasi antara dokumentasi, observasi, dan wawancara dapat digunakan untuk memastikan keakuratan data. Untuk mengidentifikasi data yang dianggap valid, peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan pihak terkait jika hasil dari metode uji keabsahan data menunjukkan perbedaan.

#### 3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan membandingkan kembali data dengan sumber aslinya sambil menerapkan metode yang sama dalam berbagai

keadaan. Jika temuan pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses tersebut diulangi hingga kepastian data diperoleh.<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup>Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 188-191.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Desa Tolada**

Desa Tolada merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Desa Tolada berjarak sekitar 27 kilometer dari ibu kota kabupaten, Masamba. Desa Tolada merupakan salah satu desa di dataran rendah. Desa Tolada berada pada ketinggian 150 m diatas permukaan laut (MDPL) dengan curah hujan rata-rata 352,00 mm. Wilayahnya diapit dua sungai, yaitu sungai Baliase dan sungai Masamba. Desa Tolada memiliki luas wilayah 1.945 hektare. Terdiri dari lahan produktif seperti sawah dan perkebunan yang tersebar di empat dusun, yakni Dusun Tolada, Dusun Topao, Dusun Lumu-lumu, dan Dusun Talagonggo. Batas wilayah Desa Tolada adalah sebagai berikut:

- a. Perbatasan sebelah Utara : Desa Sumber Wangi
- b. Perbatasan sebelah Timur : Desa Salekoe
- c. Perbatasan sebelah Selatan : Desa Malangke
- d. Perbatasan sebelah Barat : Desa Tingkara

Adapun visi dan misi Desa Tolada yaitu, sebagai berikut:

- a. Visi: Desa Tolada yang religius dengan pembangunan berkualitas dan merata yang berlandaskan semangat musyawarah.
- b. Misi

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, efektif, dan bersih.
  - 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.
  - 3) Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa.
  - 4) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.<sup>53</sup>
2. Kondisi Kependudukan Desa Tolada
- a. Penduduk berdasarkan jenis kelamin

Menurut data, jumlah penduduk di Desa Tolada pada tahun sebelumnya sebanyak 3711 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1425 jiwa dan sebanyak 2286 jiwa penduduk wanita. Adapun pada tahun berikutnya, jumlah penduduk meningkat dengan total 3831 jiwa meliputi penduduk laki-laki sebanyak 1530 jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2301 jiwa dengan perkembangan persentase pada tabel berikut:

**Tabel 4.1** Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Perincian	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1530 Orang	2301 Orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1425 Orang	2286 Orang
Persentase perkembangan	7.37%	0.66%

Sumber: Data penduduk sementara

Tabel di atas menunjukkan tingkat perkembangan jumlah penduduk di Desa Tolada yang telah mengalami peningkatan dengan persentase perkembangan 7,37% pada

<sup>53</sup>Data Profil Desa Tolada Tahun 2023

penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan meningkat sebesar 0,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

b. Penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Keadaan penduduk berdasarkan pada tingkat pendidikannya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2** Data Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Tolada

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	TK	47 orang
2	SD	1226 orang
3	SMP	836 orang
4	SMA	654 orang
5	D3	58 orang
6	S1	134 orang
7	S2	4 orang
<b>Jumlah Total</b>		<b>2959 orang</b>

Sumber: Data profil Desa Tolada 2023

c. Penduduk berdasarkan mata pencaharian

Keadaan penduduk berdasarkan mata pencaharian/jenis pekerjaannya diuraikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3** Data penduduk menurut pekerjaan di Desa Tolada

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Petani	122
Buruh Tani	35
PNS	25
Pengrajin	1
Peternak	5
Dokter Swasta	1
Perawat Swasta	3
Bidan Swasta	1
TNI	2
POLRI	4
Pengusaha Kecil, Menengah dan Besar	645
Guru Swasta	15
Karyawan Perusahaan Swasta	3
Wiraswasta	19

Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	11
IRT	864
Perangkat Desa	4
Buruh Harian Lepas	461
Pengusaha Perdagangan Hasil Bumi	2
Buruh Jasa Perdagangan Hasil Bumi	1
Pemilik Jasa Hiburan dan Pariwisata	1
Sopir	1
Tukang Jahit	1
Karyawan Honorer	34
Psikiater/Psikolog	1
Wartawan	1
Tukang Las	1
Pemuka Agama	1
Apoteker	1
Pelaut	1
Peneliti	1

Sumber: Data profil Desa Tolada Tahun 2023

## B. Hasil dan Pembahasan

Kesejahteraan ialah kondisi seseorang atau suatu kelompok masyarakat yang telah memenuhi kebutuhan dasarnya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Bukan hanya tentang memiliki harta benda atau pendapatan yang tinggi, melainkan mencakup aspek yang lebih luas, seperti kesehatan, pendidikan, lingkungan yang baik, dan hubungan sosial yang positif. Dengan tujuan mencapai kesejahteraan, pemerintah melaksanakan program keluarga harapan untuk membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga dengan memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Beberapa indikator kesejahteraan yang ada dalam program keluarga harapan yaitu ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

### 1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tolada

#### a. Pengenalan program keluarga harapan kepada masyarakat.

Bantuan program keluarga harapan (PKH) tidak serta merta diberikan kepada masyarakat, pemerintah terlebih dahulu melakukan sosialisasi mengenai

program keluarga harapan (PKH) tersebut kepada calon penerima yang memenuhi syarat peserta program keluarga harapan. Program keluarga harapan pertama kali disosialisasikan kepada masyarakat di Desa Tolada sekitar tahun 2012/2013.

b. Penetapan peserta

Penetapan peserta penerima program keluarga harapan (PKH) dilakukan pada tahun 2014, dengan jumlah penerima sekitar 20 kartu keluarga.<sup>54</sup> Bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH diterima langsung oleh ibu rumah tangga atau wanita dewasa dalam keluarga. Peran ibu sangat penting dalam keluarga karena ibu rumah tangga sebagai pengelola keuangan keluarga, sehingga program keluarga harapan (PKH) memberikan kepercayaan kepada ibu rumah tangga dalam menerima dan mengelola dana bantuan sosial.<sup>55</sup>

c. Penyaluran dana bantuan

Program keluarga harapan itu sendiri memiliki dua jenis bantuan. Selain dari bantuan yang diterima berdasarkan komponen PKH, ada bantuan lain berupa bantuan pangan non tunai (BPNT) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat PKH. BPNT itu sendiri merupakan bantuan dalam bentuk saldo elektronik yang bertujuan untuk digunakan memenuhi kebutuhan pangan seperti beras, telur, daging, sayur, dan buah-buahan di toko (e-warung) yang bekerja sama dengan kementerian sosial. Setiap KPM PKH yang terdaftar sebagai penerima BPNT menerima bantuan dengan besaran Rp200.000 per bulan.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup>Wawancara Bapak Andi Zulpadli, Kepala Desa Tolada, pada (Jum'at, 21 Juni 2024, Pukul 17:00 WITA)

<sup>55</sup>Fasiha and Muhammad Alwi, "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan," *Sosio Informa* 9, no. Kesejahteraan Sosial (2023): 25.

<sup>56</sup>Wawancara Koordinator PKH Kabupaten Luwu Utara, (Senin, 3 Juni 2024).

**Tabel 4.4** Jumlah Penerima PKH Desa Tolada

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah KPM</b>
<b>2022</b>	183
<b>2023</b>	178
<b>2024</b>	174

Sumber: Dinas Sosial Luwu Utara

Pada Tabel 4.4 di atas, disajikan data jumlah penerima manfaat PKH di Desa Tolada yang berubah setiap tahunnya. Perubahan ini bersifat positif karena jumlah penerima yang menurun setiap tahunnya, penyebab berkurangnya yaitu adanya graduasi peserta PKH. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan keluarga penerima manfaat di graduasi atau tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat program keluarga harapan (PKH):

a. Graduasi alamiah

Graduasi ilmiah merupakan berakhirnya kepesertaan dikarenakan kondisi keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM PKH) sudah tidak memenuhi kriteria kepesertaan, seperti:

- 1) Tidak memiliki pengurus kepesertaan;
- 2) Tidak memiliki salah satu komponen kepesertaan: Kesehatan, Pendidikan atau Kesejahteraan Sosial.

b. Graduasi Sejahtera Mandiri

Dengan graduasi mandiri, menandakan berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi individu tersebut sudah membaik dan tidak lagi dianggap mampu sehingga tidak layak menerima bantuan sosial PKH. Baik atas inisiatif KPM sendiri maupun atas dorongan dari Pendamping Sosial atau pihak lain, graduasi mandiri dapat dilakukan. Contoh:

- 1) Karena KPM merasa mampu, tidak ingin bergantung pada bansos PKH, dan/atau ingin memberikan kesempatan kepada keluarga lain, mereka menolak bantuan.;
- 2) KPM mengalami perubahan kondisi keuangan menjadi kaya ketika mereka memiliki aset, memiliki usaha atau kegiatan ekonomi yang sukses, atau mendapatkan jabatan dengan gaji yang lebih tinggi, misalnya menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).<sup>57</sup>

## 2. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Ekonomi

Program keluarga harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini yaitu dengan memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Meskipun bukan program yang secara langsung meningkatkan pendapatan dalam arti menghasilkan uang melalui pekerjaan, namun program ini memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga penerima manfaat salah satunya yaitu meningkatkan daya beli masyarakat penerima manfaat program keluarga harapan.

Selain dapat meningkatkan daya beli, program keluarga harapan juga berupaya untuk merubah pola pikir dan melatih kemandirian peserta untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui program kelompok usaha bersama (KUBE). Pendamping program keluarga harapan Desa Tolada melakukan pembentukan pengurus untuk mengelola KUBE yang telah direncanakan berupa

---

<sup>57</sup>Kementerian Sosial Republik Indonesia, "PETUNJUK TEKNIS" (Kementerian Sosial, 2020), 6.

toko kebutuhan pokok seperti beras dan tabung gas LPG. Namun, usaha tersebut berjalan sesuai arahan pendamping hanya sekitar 2 bulan. Dikarenakan pendamping sebelumnya diganti, dan pendamping yang baru jarang memantau jalannya KUBE di Desa Tolada sehingga terjadi beberapa kendala diantaranya yaitu pengelolaan keuangan yang kurang bagus dan perputaran modal menjadi tidak lancar, mengakibatkan usaha tersebut mengalami kerugian. Kerugian menyebabkan para pengurus tidak lagi melanjutkan usaha tersebut.<sup>58</sup>

Kelompok usaha bersama (KUBE) bukan satu-satunya program yang gagal setelah penggantian pendamping, salah satu program yang juga terhenti yaitu tabungan wajib peserta program keluarga harapan setiap bulannya sebesar Rp20.000 juga terhenti. Hingga kini, tidak ada lagi program peningkatan pendapatan secara langsung dan hanya fokus pada penggunaan dana bantuan yang ada dengan tepat.

### 3. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pendidikan

Program keluarga harapan (PKH) memainkan peran penting dalam meningkatkan akses pendidikan untuk anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah melalui pemberian bantuan tunai bersyarat. Berikut hasil wawancara dengan keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM/PKH) di Desa Tolada Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara.

Ibu Nasriah sebagai penerima manfaat PKH di Desa Tolada mengatakan bahwa beliau menerima bantuan PKH sejak tahun 2016 dengan kriteria bantuan peserta pendidikan. Hingga kini, ibu Nasriah masih menerima bantuan pendidikan

---

<sup>58</sup>Wawancara Ibu Ira, Ketua Kelompok PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024)

setingkat SMP/Sederajat yang pencairannya dilakukan empat tahap dalam setahun. Dana bantuan tersebut digunakan untuk memenuhi keperluan sekolah anaknya yaitu membeli perlengkapan sekolah. Menurut ibu Nasriah, meskipun program keluarga harapan (PKH) belum mampu menyejahterakan keluarganya, namun program bantuan tersebut sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan anaknya.<sup>59</sup>

Ibu Rahmatang sebagai salah satu penerima PKH di Desa Tolada mengatakan bahwa beliau menerima bantuan PKH sejak tahun 2014 dengan kriteria bantuan pendidikan setingkat SD/Sederajat. Menurut ibu Rahmatang, program bantuan pendidikan ini sangat bermanfaat bagi keluarganya. Dengan adanya bantuan tersebut, beliau tidak lagi khawatir tentang biaya pendidikan anaknya sehingga uang yang dihasilkan dari bertani bisa digunakan untuk pemenuhan kebutuhan yang lain.<sup>60</sup>

Ibu Hira merupakan salah satu penerima manfaat PKH di Desa Tolada yang saat ini menerima bantuan pendidikan setingkat SMA/Sederajat. Ibu Hira merasa sangat terbantu dengan adanya program keluarga harapan (PKH) dalam menunjang pendidikan anaknya. Dengan kondisi lingkungan yang rawan banjir sehingga sangat merugikan para petani dan mengakibatkan penghasilan yang tidak menentu, bantuan pendidikan ini benar-benar membantu memenuhi kebutuhan sekolah anaknya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Wawancara Ibu Fitri, Peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024).

<sup>60</sup>Wawancara Ibu Rahmatang, Peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024)

<sup>61</sup>Wawancara Ibu Hira, Peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024).

Ibu Fatma, salah satu penerima manfaat PKH dengan kriteria bantuan pendidikan mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut sangat bermanfaat dalam menunjang pendidikan anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi yang rendah, di tengah sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari akibat harga barang yang terus naik sedangkan pendapatan keluarga yang tidak menentu sehingga hanya dapat menutupi kebutuhan pokok anggota keluarga. Berkat bantuan dana pendidikan, keluarga penerima manfaat PKH dapat mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan sekolah dengan harga yang terus naik.<sup>62</sup>

Ibu Hasna sebagai penerima manfaat PKH dengan kriteria bantuan dana pendidikan yang saat ini anak-anaknya mengenyam pendidikan di tingkat SD/Sederajat dan SMP/Sederajat. Menurut ibu Hasna, program keluarga harapan (PKH) memang sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan sekolah anak-anaknya. Selain itu, bantuan yang diterima bukan hanya dana pendidikan tapi ada juga bantuan non tunai yang disalurkan melalui kartu merah yang diperuntukkan untuk pemenuhan pangan seperti beras, dan lain sebagainya.<sup>63</sup>

**Tabel 4.5** Sarana Pendidikan Desa Tolada

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	TK	2
3	SD	5
4	SMP	3
5	SMA	1
<b>Total</b>		12

Sumber: Data Profil Desa Tolada 2023

- a. Meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan

<sup>62</sup>Wawancara Ibu Fatma, Peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024).

<sup>63</sup>Wawancara Ibu Hasna, Peserta PKH Desa Tolada, (Selasa, 11 Juni 2024).

Bantuan PKH mendorong orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka karena adanya persyaratan wajib kehadiran anak di sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Ira, selaku ketua kelompok PKH di Desa Tolada berikut:

*“Penerima PKH bantuan pendidikan diingatkan untuk memastikan anak-anaknya sekolah karena bantuan akan ditunda jika kehadiran di sekolah kurang dari 80%, dan apabila terus berlanjut maka dana bantuannya terancam dihentikan. Ini dilakukan agar tujuan dari bantuan program keluarga harapan tercapai. Dan dengan adanya peringatan tersebut pihak orang tua turut bekerja sama untuk memastikan anak-anaknya bersekolah.”<sup>64</sup>*

Program edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pendamping PKH membantu menambah pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan anak.

b. Meringankan beban biaya pendidikan

Bantuan tunai PKH dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak di sekolah, seperti seragam, buku tulis, dan alat tulis. Dengan adanya bantuan ini dapat mengurangi beban keuangan keluarga, sehingga orang tua mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Hal ini dapat sesuai dengan pernyataan ibu Darma, salah satu penerima PKH komponen pendidikan di Desa Tolada, sebagai berikut:

*“Berkat bantuan ini biaya sekolah anak-anak bisa terbantu, meskipun tidak menutupi sepenuhnya tapi dengan adanya PKH bisa mengurangi beban biaya keperluan sekolah. Jadi, kami tinggal menambah kekurangan biaya lainnya*

---

<sup>64</sup>Wawancara Ibu Ira, Ketua Kelompok PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024)

*misalnya untuk keperluan praktiknya yang terkadang butuh biaya yang tidak sedikit. Sejak menerima bantuan ini kami tidak terlalu khawatir tentang biaya kebutuhan sekolahnya anak-anak, kami bisa memfokuskan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan yang lain lebih dulu.”<sup>65</sup>*

**Tabel 4.6** Jumlah Penerima PKH Komponen Pendidikan di Desa Tolada

<b>Tingkat pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>SD</b>	86
<b>SMP</b>	62
<b>SMA</b>	62
<b>Total</b>	210 Siswa

Sumber: Dinas Sosial Luwu Utara 2024

c. Meningkatkan angka partisipasi sekolah

**Tabel 4.7** Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 17-24 di Kabupaten Luwu Utara

<b>Usia</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>7-12 Tahun</b>	99,36	99,52	99,64	99,99
<b>13-15 Tahun</b>	93,04	93,20	92,89	92,90
<b>16-18 Tahun</b>	72,16	71,79	72,22	72,13
<b>19-24 Tahun</b>	14,25	14,55	15,34	18,52

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa angka partisipasi sekolah di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan terutama pada usia 7 sampai 15 tahun.

Program keluarga harapan (PKH) tidak dapat mengentaskan kemiskinan dalam waktu singkat. Namun, dengan adanya program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan. Adanya fasilitas pendidikan sehingga anak-anak bisa bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi daripada orang tuanya. Latar belakang keluarga yang kurang mampu sehingga sulit memenuhi biaya pendidikan,

<sup>65</sup>Wawancara ibu Darma, peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024).

dengan dana pendidikan dari PKH ini para orang tua mampu menyekolahkan anaknya sehingga menciptakan peluang untuk mengubah perekonomian keluarganya di masa mendatang.

Program keluarga harapan (PKH) juga diharapkan dapat merubah pola pikir keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan diberikannya dana pendidikan serta kesehatan, mereka bisa mengalihkan penghasilan mereka untuk hal lain misalnya membuka usaha agar lebih produktif lagi dan secara tidak langsung merubah perekonomian mereka.<sup>66</sup>

#### 4. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesehatan

##### a. Meningkatkan kesadaran akan kesehatan

Pendamping PKH melakukan edukasi tentang pentingnya kesehatan terhadap penerima, ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran agar menjaga kesehatan dan memeriksakan kesehatan secara rutin. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan salah satu kader posyandu di Desa Tolada berikut:

*“Ada beberapa peserta PKH yang memiliki balita terdaftar di posyandu, dan memang rutin datang ke posyandu untuk melakukan imunisasi. Himbauan dari pendamping PKH mampu meningkatkan kesadaran para orang tua agar memperhatikan asupan gizi dan pentingnya imunisasi secara teratur terhadap anak usia dini juga menjadi salah satu motivasi orang tua untuk datang ke posyandu.”<sup>67</sup>*

##### b. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan

---

<sup>66</sup>Irma Mutmainnah, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung” (IAIN TULUNGAGUNG, 2019): 81-82.

<sup>67</sup>Wawancara ibu Niar, Kader Posyandu Desa Tolada, (Minggu 30 Juni 2024)

Keluarga penerima manfaat PKH terdaftar sebagai peserta BPJS dan dibebaskan dari iuran biaya BPJS kesehatan. Dengan begitu, penerima PKH dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis, hal ini dapat meningkatkan angka partisipasi keluarga miskin dalam menggunakan layanan kesehatan.

Berikut beberapa hasil wawancara dengan peserta penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dengan kriteria bantuan kesehatan di Desa Tolada.

Ibu Krisdayanti merupakan penerima manfaat PKH dengan kriteria bantuan kesehatan untuk anak usia dini (0-6 tahun). Menurutnya, pengadaan program keluarga harapan (PKH) sangat bermanfaat bagi keluarga miskin. Melihat kondisi saat ini dimana harga kebutuhan pokok yang terus naik, sedangkan pendapatan tidak menentu sehingga sulit untuk memenuhi semua kebutuhan. Dengan adanya bantuan tersebut, mampu memenuhi kebutuhan gizi anaknya, seperti susu.<sup>68</sup>

Ibu Tiara sebagai salah satu penerima manfaat dari PKH dengan kriteria bantuan kesehatan. Ibu Tiara memiliki anak balita yang masuk kategori stunting, sehingga diperlukan perhatian penuh dalam pemenuhan kebutuhan gizinya. Dengan adanya program keluarga harapan (PKH), keluarga penerima manfaat PKH jadi lebih rajin datang ke posyandu untuk memeriksakan kesehatan anaknya.<sup>69</sup>

Ibu Tasma, salah satu penerima manfaat PKH dengan kriteria bantuan kesehatan untuk anak usia dini sejak tahun 2020. Menurutnya bantuan ini mampu mengurangi beban pengeluarannya, karena beliau tinggal di daerah rawan banjir

---

<sup>68</sup>Wawancara Ibu Krisdayanti, Peserta PKH Desa Tolada, (Senin, 10 Juni 2024).

<sup>69</sup>Wawancara Ibu Tiara, Peserta PKH Desa Tolada, (Sabtu, 15 Juni 2024).

serta pendapatan yang bergantung pada lahan jeruk yang harganya tidak menentu. Dengan pendapatan yang tidak stabil tersebut, sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga terlebih lagi beliau memiliki balita yang perlu diperhatikan pemenuhan kebutuhan gizinya.<sup>70</sup>

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa program keluarga harapan (PKH) di Desa Tolada belum bisa dikatakan menyejahterakan penerima manfaat PKH. Meski begitu, program bantuan tersebut telah mampu meringankan beban rumah tangga miskin dalam pemenuhan kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya itu, PKH juga menyalurkan bantuan non tunai dengan tujuan pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarga penerima manfaat yang disalurkan setiap bulannya. Dengan adanya bantuan non tunai tersebut, mampu meringankan beban kebutuhan pokok keluarga peserta PKH. Hal ini sesuai dengan undang-undang pasal 1 ayat (9) No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial menyatakan “perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial”.<sup>71</sup> Program ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.

### **C. Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Dalam Islam itu sendiri, kemiskinan tidak dapat dihilangkan. Meski begitu, kemiskinan masih dapat diminimalisir dengan berbagai upaya untuk mencapai

---

<sup>70</sup>Wawancara Ibu Tasma, Peserta PKH Desa Tolada, (Sabtu, 15 Juni 2024).

<sup>71</sup>Kementerian Sosial, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

kehidupan yang sejahtera. Berikut beberapa faktor penyebab kemiskinan menurut Quraish Shihab<sup>72</sup>:

1. Malas Bekerja

Salah satu hal yang menyebabkan kemiskinan adalah kemalasan. Seseorang yang memiliki pola pikir malas akan menjadi apatis dan hanya mengandalkan keberuntungan. Seseorang yang memiliki sikap malas juga memiliki kecenderungan untuk bergantung pada teman, keluarga, dan orang lain.

2. Pendidikan yang rendah

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kurangnya keterampilan yang diperlukan, terbatasnya pendidikan serta tidak memiliki keterampilan tertentu membuat lebih sulit untuk memasuki dunia kerja.

3. Lapangan kerja terbatas

Lapangan kerja yang terbatas dapat menyebabkan kemiskinan bagi masyarakat karena adanya keterbatasan seseorang, baik dari segi keterampilan maupun dari segi modal, sehingga lapangan kerja yang terbatas juga menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan.

4. Sumber daya alam terbatas

Ketika sumber daya alam suatu wilayah tidak lagi bermanfaat bagi kehidupan mereka, kemiskinan akan melanda. Ada yang mengatakan bahwa masyarakat dimiskinkan oleh alam. Hal ini menyiratkan bahwa sumber daya alam

---

<sup>72</sup>M. Quraish Shihab, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 610.

yang melimpah, seperti daerah berbatu, kering tanpa kekayaan mineral, dan sebagainya, kaya akan sumber daya alam.

Menurut Asy-Syatibi, tujuan dari *maqashid al-syariah* yaitu kemaslahatan umat manusia. Salah satu inisiatif yang diambil pemerintah untuk mengakhiri siklus kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Hal ini sejalan dengan tujuan dari *maqashid al-syariah* dalam upaya mewujudkan kemaslahatan. Asy-Syatibi membagi masalah menjadi 3 yaitu *masalah Dharuriyyat, Hajiyyat, dan Tahsiniyyat*.<sup>73</sup>

Berikut ini beberapa analisis mengenai peran program keluarga harapan (PKH) dalam peningkatan pendidikan dan kesehatan dari perspektif *maqashid al-syariah* berdasarkan masalah *dharuriyyat*:

1. Memelihara/menjaga agama (*hifdzu al-din*)

Memelihara agama adalah cara lain untuk mendukung kesejahteraan dan keadilan sosial. Program Keluarga Harapan (PKH) membantu keluarga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap pendidikan, yang dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan, program ini mendukung keadilan sosial dan kemampuan individu untuk mencapai potensi penuh mereka.

2. Menjaga jiwa (*hifdzu al-nafs*)

Pemeliharaan jiwa merupakan salah satu dari lima tujuan utama *maqashid al-syariah*. Program keluarga harapan (PKH) memiliki peran penting dalam

---

<sup>73</sup>Melis, "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam AL-Syatibi," *ISLAMIC BANKING* Vol. 2 (2016): 53–33.

meningkatkan akses penerimanya terhadap layanan kesehatan. Dengan memastikan akses yang lebih baik ke perawatan medis dan pengobatan, program ini berkontribusi secara langsung untuk melindungi jiwa manusia dari berbagai risiko kesehatan yang dapat mengancam kehidupan.

3. Menjaga akal (*hifdzu al-‘aql*)

Salah satu tujuan *maqashid al-syariah* adalah pemeliharaan akal, yang dapat dicapai melalui Program Keluarga Harapan (PKH), terutama dengan memberikan bantuan dana untuk pendidikan sehingga memudahkan anak-anak usia sekolah untuk bersekolah.

4. Menjaga/memelihara garis keturunan (*hifdzu al-nasl/al-‘ird*)

Salah satu tujuan *maqashid al-syariah* yaitu menjaga atau memelihara keturunan. Dengan adanya penyediaan bantuan untuk meningkatkan akses pendidikan, Salah satu program yang membantu memberikan kesempatan kepada anak-anak dari rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Mereka dapat menantikan masa depan yang lebih baik dengan bantuan pendidikan yang berkualitas dan dapat membantu memutus siklus kemiskinan generasional.

5. Menjaga harta (*hifdzu al-mal*)

Program Keluarga Harapan (PKH) memberikan kontribusi dengan membantu secara langsung keluarga berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian, program ini membantu dalam melindungi harta keluarga dari kemungkinan kerusakan ekonomi akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Melalui perspektif *maqashid al-syariah*, program keluarga harapan (PKH) dapat dikatakan sebagai salah satu upaya konkret untuk mencapai tujuan-tujuan utama syariah islam dalam mendukung kesejahteraan umat melalui pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup, terutama dalam hal pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui bahwa:

1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Tolada yang dimulai sejak tahun 2014 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dapat dikatakan cukup efektif, ini berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan adanya penurunan jumlah penerima manfaat PKH setiap tahunnya di Desa Tolada. Salah satu alasan graduasi peserta PKH di Desa Tolada yaitu kondisi ekonomi keluarga penerima manfaat telah membaik, dan juga sudah tidak memenuhi syarat peserta dikarenakan anak dari peserta PKH telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat SMA/Sederajat. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan melalui PKH dengan memberikan bantuan dana pendidikan sehingga setiap anak memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak tanpa harus mengkhawatirkan biaya kebutuhan sekolah yang tidak sedikit, cukup berhasil. Selain bidang pendidikan, bantuan sosial PKH di bidang kesehatan juga memberi dampak positif pada keluarga penerima manfaat. Tidak hanya dalam hal membantu pemenuhan kebutuhan anak usia dini, program ini juga meningkatkan kesadaran orang tua terhadap pentingnya melakukan imunisasi dan pemenuhan gizi pada anak.

2. Program keluarga harapan (PKH) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, hal ini sejalan dengan pandangan Islam terhadap urgensi dalam mengurangi kemiskinan yang tujuan akhirnya adalah kemaslahatan. Dalam Islam, pemerintah/pemimpin memiliki tanggung jawab dalam membuat kebijakan dan setiap kebijakannya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh umat.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada hasil penelitian, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Peserta penerima manfaat Program keluarga harapan (PKH) perlu diberikan pelatihan keterampilan berwirausaha. Pada awalnya, pelatihan keterampilan rutin dilakukan setiap bulan pada pertemuan rutin bulanan para peserta yang dipandu oleh pendamping program keluarga harapan(PKH). Namun setelah perubahan pendamping, kegiatan tersebut tidak lagi dilakukan. Padahal dengan adanya pelatihan keterampilan tersebut, bisa memberikan motivasi dan peluang bagi peserta PKH untuk mandiri dan tidak ketergantungan terhadap bantuan sosial.
2. Penelitian selanjutnya perlu mengkaji lebih dalam untuk membuktikan pengaruh program keluarga harapan (PKH) dalam tujuannya mengentaskan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. 1st ed. Syakir Media Press, 2021.
- Abdussamad, Zuchri. *Pusaran Kemiskinan Dalam Perspektif Pelayanan Publik: The Vircle of Poverty from A Public Servise Perspective*. 1st ed. Syakir Media Press, 2023.
- Adzkiya', Ubbadul. "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam Dan Pancasila." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, no. 1 (2020).
- Al-Khadimiy, Nur al-Din ibn Mukhtar. *'Ilm Al-Maqaashid Al-Syariah*. 1st ed. Riyadh: Maktabah al-Abikan, 2001.
- Al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn. *Lisaan Al-'Arab*. 8th ed. Beirut: Daar Shaadir, n.d.
- Al-Manzhur, Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal al-Din ibn. *Lisaan Al-'Arab*. 3rd ed. Beirut: Daar Shaadir, 1441.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023," 2023. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara , Maret 2023," no. 7 (2023). <https://luwuutarakab.bps.go.id/pressrelease/2023/12/29/18/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara--maret-2023.html>.
- Badan Pusat Statistik. "Profil Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara 2021," 2022. <https://luwuutarakab.bps.go.id/pressrelease/2022/01/03/6/profil-kemiskinan-kabupaten-luwu-utara-maret-2021.html>.
- Busyro. *Maqaashid Al-Syariah*. 1st ed. KENCANA, 2019.
- Desi Pratiwi. "Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Ditinjau Dari Ekonomi Islam." IAIN METRO, 2020.
- Fasiha, and Muhammad Alwi. "Urgensi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan." *Sosio Informa* 9, no. Kesejahteraan Sosial (2023).
- Hukum, Seksi Informasi, and Ditama Binbangkum. "Bansos PKH 2023 (1)," 2023. <https://jdih.bpk.go.id/File/Download/a8a1765a-7bd4-4b8f-8931->

ac4b974799f4/Bansos PKH 2023.pdf.

Ismail. "Kemiskinan Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Ekonomi Syari'ah* 3, no. 1 (2020).

Isna, Nur. "Pandangan Islam Terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Hubungannya Dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar)." UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2020.

Iva Faulana, Indri Murniawaty, Rusdarti. "Model Pengentasan Kemiskinan Melalui Kebijakan PKH Di Jawa Tengah." *Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi Dan Ilmu Ekonomi* V (2021).

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Wali, 2016.

KEMENSOS. "Program Keluarga Harapan (PKH)." Kementerian Sosial, n.d. <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)," 2021. <https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf>.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Petunjuk Teknis." Kementerian Sosial, 2020.

Kementrian Sosial. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial," n.d. <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/sehat/UU-11-2009KesejahteraanSosial.pdf>.

Kesos, Puslitbang, and Pranata Pembangunan UI. *Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan Pasca Diklat Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga*. 1st ed. PUSLITBANGKESOS KEMENTERIAN SOSIAL RI, 2020.

Linda. "Efektivitas Program Sustainable Development Goals (SDGS) Dinas Sosial Dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Luwu Utara." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2023.

Lukman. "Miliki Lima Program Pemberdayaan, Kelompok PKH Di Sabbang Selatan Ini Punya Kas Rp 322 Juta," 2020. <https://portal.luwuutarakab.go.id/post/miliki-lima-program-pemberdayaan-kelompok-pkh-di-sabbang-selatan-ini-punya-kas-rp-322-juta>.

Maipi, Indra. *Memahami Dan Mengukur Kemiskinan*. Edited by Muhammad Arif. Absolute Media, 2013.

- Mawardi, Chalik. "Tribun Wiki: Sejarah Dan Profil Singkat Desa Tolada." *Tribun-Timur.com*, 2020.
- Melis. "Pemikiran Tokoh Ekonomi Muslim: Imam AL-Syatibi." *ISLAMIC BANKING* Vol. 2 (2016).
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Mutmainnah, Irma. "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Serut Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung." IAIN TULUNGAGUNG, 2019.
- Nasution, Chairika, Kgs. M. Sobri, Azhar, and Abdul Najib. "Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kota Medan." *Perspektif* 12, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i4.10076>.
- Ni'mah, Isnaini Wiqoyatun. "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Desa Karangwader, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan." Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022.
- Panjaitan, Merphin. *Memberdayakan Kaum Miskin*. BPK Gunung Mulia, 2000.
- PPN/Bappenas, Kementerian. "Tingkat Kemiskinan," 2023. [peppd.bappenas.go.id/media/infograph?indikator=tingkat\\_kemiskinan&wilayah=nasional](http://peppd.bappenas.go.id/media/infograph?indikator=tingkat_kemiskinan&wilayah=nasional).
- Putri, Nandia Saskhita. "Analisis Peran Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Mojaranu)." IAIN TULUNG AGUNG, 2019.
- Rosmiati dkk. "Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II." KEMINFO RI, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedi Al-Qur'an: Kajian Kosa Kata*. Vol. 3. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Subagiyo, Rokhmat. *Metode Penelitian Islam: Konsep & Penerapan*. Jakarta: Alim's Publishing, 2017.

- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edited by Sutopo. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. 2nd ed. Bandung: ALFABETA, 2021.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Uma Sekaran dan Roger Bougie. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. 6th ed. Jakarta: Salemba Empat, 2019.
- Yuli, Sri Budi Cantika. "Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam." *Ekonomika-Bisnis* 4 (2013).
- Yulizar, Febrina Sulivia Putri. "Keberhasilan Program Keluarga Harapan Dalam Pengentasan Kemiskinan." Universitas Lampung, 2022.
- Alam, M. N., Erwin, E., Hamida, H., & Sukran, S. (2023). The Influence of Islamic Work Ethics on Organizational Commitment and Performance of Halal Restaurant Employees. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 16(1), 97. <https://doi.org/10.24843/jekt.2023.v16.i01.p06>
- Ilyas, M. (2022). Old Mosque in a Religious City: Masjid Jami' Tua Palopo as a Center of Da'wah Development. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 16(2), 383–396. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v16i2.20256>
- Marwing, A., Asni, & Astuti, W. (2022). The Concept of Impeachment in the Indonesia's Constitutional System from the Perspective of Fiqh Siyāsa. *Al- 'Adalah*, 19(2), 339–356. <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i2.14289>
- Mujahidin, M., & Majid, N. H. A. (2022). Information Technology Utilization on the Performance of Sharia Bank Employees in Palopo City. *Ikonomika*, 6(2), 219–236. <https://doi.org/10.24042/febi.v6i2.10423>
- Rifuddin, B., Amal Mas, N., & Kartika, B. (2022). Analyzing The Impact of Productive Zakat Utilization on The Mustahiq Economic Independence in Malaysia and Indonesia. *IKONOMIKA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 75–96. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ikonomika>
- Sulaeman, S., Ridwan, M., Nurdin, A., Malawat, M., Kasim, E. W., Darma, D., & Yusuf, H. (2023). Communication Patterns of Muslim Communities' After Involvement in the Pela Gandong Ritual in Moluccas Immanuel Church, Indonesia. *Integrative Psychological and Behavioral Science*, 57(3), 1024–1049. <https://doi.org/10.1007/s12124-023-09753-4>
- Yusmad, M. A., Irwansyah, Bin Marinsah, S. A., Ayyub, M., & Muang, M. S. K. (2024). Revitalization Supervision Islamic Banking in Enhancement Compliance in Indonesia and Malaysia. *Samarah*, 8(1), 468–494. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v8i1.20524>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1

#### **Panduan Wawancara Penelitian Skripsi**

**Judul:** Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Miskin Ditinjau dari Ekonomi Islam

#### **Tujuan Wawancara:**

- Memahami peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
- Memahami peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat miskin.
- Menilai kesesuaian Program Keluarga Harapan (PKH) dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

#### **Informan:**

- Penerima Program Keluarga Harapan (PKH)
- Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
- Instansi terkait (Dinas Sosial)

#### **Pertanyaan Wawancara:**

##### **Bagian 1: Data Demografi**

1. Nama lengkap:
2. Usia:
3. Jenis kelamin:
4. Pekerjaan:
5. Pendidikan terakhir:
6. Jumlah anggota keluarga:

##### **Bagian 2: Akses Pendidikan**

1. Apakah Anda mengetahui Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Berapa lama Anda telah menerima bantuan PKH?
3. Apakah Anda menggunakan bantuan PKH untuk membiayai pendidikan anak Anda?
4. Jika ya, jelaskan bagaimana bantuan PKH membantu anak Anda dalam mengakses pendidikan?
5. Menurut Anda, apa manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi pendidikan anak-anak di desa/kelurahan ini?
6. Apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses pendidikan?

##### **Bagian 3: Akses Kesehatan**

1. Apakah Anda menggunakan bantuan PKH untuk membiayai kesehatan keluarga Anda?
2. Jika ya, jelaskan bagaimana bantuan PKH membantu keluarga Anda dalam mengakses kesehatan?
3. Menurut Anda, apa manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) bagi kesehatan masyarakat di desa/kelurahan ini?
4. Apakah Anda memiliki saran untuk meningkatkan efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan akses kesehatan?

## Lampiran 2 Surat Izin Meneliti



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
 Nomor : 01918/00695/SKP/DPMPSTSP/V/2024

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Khusnul Khatimah. H beserta lampirannya.  
 Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/175/V/Bakesbangpol/2024 Tanggal 30 Mei 2024  
 Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :

Nama : Khusnul Khatimah. H  
 Nomor : 082293186137  
 Telepon :  
 Alamat : Dsn. Talangonggo, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
 Sekolah / Instansi : Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Palopo  
 Judul Penelitian : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi pada Penerima PKH Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara)  
 Lokasi Penelitian : Tolada dan Dinas Sosial, Desa Tolada Kecamatan Malangke, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan ketentuan sebagai berikut

1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Bulan (3 Juni-30 Juni).
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Diterbitkan di : Masamba  
 Pada Tanggal : 30 Mei 2024

---

an. BUPATI LUWU UTARA  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu

  
**H. ALAUDDIN SUKRI, M.SI**  
 NIP : 196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
 No. Seri : 01918

**DPMPTSP**  
 www.dpmptsp.luwuutara.go.id

## Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul:

“Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat Miskin di Tinjau dari Ekonomi Islam”

Yang ditulis oleh:

Nama : Khusnul Khatimah H.

NIM : 17 0401 0192

Program Studi : Ekonomi Syariah

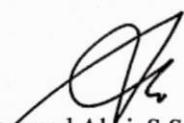
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Palopo, 23 Agustus 2024

Pembimbing



Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.

NIP 198907152019081001

## Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi an. Khusnul Khatimah H.

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Khusnul Khatimah H.

NIM : 17 0401 0192

Program Studi : Ekonomi Syariah

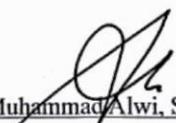
Judul Skripsi : Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Upaya Peningkatan Pendidikan dan Kesehatan Ditinjau dari Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Pembimbing

  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.El.  
NIP 198907152019081001

Tanggal: 23 Agustus 2024

## Lampiran 5 Surat Keterangan MBTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
UNIT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo  
Web: mahad.iainpalopo.ac.id /Email : mahad@iainpalopo.ac.id

---

**SURAT KETERANGAN LULUS MENGAJI**

Nomor : 210/In.19/MA.25.02/08/2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palopo menerangkan bahwa:

Nama : Khusnul Khatimah H.  
NIM : 17 0401 0192  
Fakultas/Prodi : Ekonomi & Bisnis Islam

telah mengikuti ujian mengaji (Menulis dan Membaca) Al-Qur'an dan dinyatakan;

**Lulus** dengan predikat:

Membaca : Istimewa, Sangat Baik, Baik\*  
Menulis : Istimewa, Sangat Baik, Baik\*

demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 19 Agustus 2024

Kepala UPT Ma'had Al-Jami'ah

**Dr. Mardi Takwim, M.HI.**  
NIP. 196805031998031005

Keterangan:

\* Coret yang tidak perlu

## Lampiran 6 Dokumentasi



Ket: Pengajuan permohonan data di Dinas Sosial



Ket: Pengambilan rekap data PKH didampingi koordinator PKH Luwu Utara



Ket: Kantor Desa Tolada



Ket: Peserta PKH Dusun Talagonggo

## RIWAYAT HIDUP



**Khusnul Khatimah H.**, lahir di Tolada pada tanggal 30 Maret 1998. Penulis merupakan anak ke dua dari lima bersaudara dari seorang ayah bernama Hamsah dan ibu Hirawati. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Dg. Mangatta Desa Tolada Kec. Malangke Kab. Luwu Utara. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 140 Lumu-lumu. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTs As'adiyah No. 39 Belawa Baru hingga tahun 2013. Pada saat menempuh pendidikan di MTs, penulis menjabat sebagai ketua OSIS dan aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler salah satunya yaitu Pramuka. Pada tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 2 Belopa. Selama menempuh pendidikan di tingkat SMA, penulis aktif dalam berbagai kegiatan baik intra maupun ekstra diantaranya; OSIS, PIK Remaja, Pramuka, Klub Fisika, dan Klub Bahasa. Penulis menyelesaikan pendidikan di tingkat SMA pada tahun 2016, dan kemudian di tahun 2017 melanjutkan pendidikan di Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person penulis: *khusnul\_khatimah.h98@gmail.com*